



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 229/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
LANNY JAYA TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TOLIKARA TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 24 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 229/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024
- Pemohon: Yosep Payage dan Mari Mirin

PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya

PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- Pemohon: Nus Weya dan Yan Wenda

PERKARA NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- Pemohon: Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando

PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- Irinus Wanimbo dan Arson R Kogoya

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 24 Januari 2025, Pukul 13.37 – 16.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Hani Adhani
2. Irfan Nur Rachman
3. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
4. Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
5. Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Yustian Dewi Widiastuti
2. Yosef Elopore

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Soepriyadi
2. Rizal

C. Pemohon Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yan Wenda

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yance Tenouye

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rizky Anugrah Putra
2. Zul Fahmi

F. Pemohon Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Arson R. Kogoya

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Achmad Zulkifli Syifa

H. Termohon:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Abakuk Iksomon | (KPU Kabupaten Yahukimo) |
| 2. Aminastri Kogoya | (KPU Kabupaten Lanny Jaya) |
| 3. Lutius Kogoya | (KPU Kabupaten Tolikara) |
| 4. Musa Jikwa | (KPU Kabupaten Tolikara) |
| 5. Yunius Wonda | (KPU Kabupaten Tolikara) |

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Stefanus Budiman
2. Muhammad Wiman Wibisana
3. Ahmad Tawakkal

4. Andi Jaya Adiputra
5. Arman

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 229/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Willem Wandik

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Irwan Gustaf Lalegit

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aloysius Renwarin
2. Elisabeth Renwarin

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 306/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Alberth E Rumbekwan

P. Bawaslu:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Yusem Bahabol | (Kab.Yahukimo) |
| 2. Somun Kobak | (Kab.Yahukimo) |
| 3. Mardin Wenda | (Kab. Lanny Jaya) |
| 4. Dorkas Tabuni | (Kab. Lanny Jaya) |
| 5. Busiri Payokwa | (Kab. Tolikara) |
| 6. Niman | (Kab. Tolikara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.
Sidang Dalam Perkara 297, 303, 306, 229, dan 285 PHPU Bupati Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, yang belum hadir siapa ini? Pemohonnya semua sudah hadir? Pemohon 297? Dinyalakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE TENOUYE [00:48]

297, kami hadir.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]

Pemohon 297. Pemohon 303?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZKY ANUGRAH PUTRA [00:53]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:54]

Pemohon 306?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [00:57]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

Pemohon 229?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 299/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:00]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01]

Pemohon 285?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOEPRİYADI [01:02]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Baik. Termohon KPU Tolikara? Sudah hadir?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:11]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]

Terus, KPU Yahukimo?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Di mana Yahukimo? Belakang? Oke.
Lanny Jaya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [01:25]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]

Baik. Bawaslu-nya sudah lengkap.
Kemudian Pihak Bawaslu sekarang? Bawaslu Tolikara?

18. BAWASLU: BUSYIRI PAYOKWA [01:38]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Bawaslu Yahukimo?

20. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:42]

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Bawaslu Lanny Jaya?

22. BAWASLU: DORKAS TABUNI [01:46]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48]

Baik. Kemudian Pihak Terkait 297?

**24. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:
IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:51]**

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Pihak Terkait 303?

**26. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ALOYSIUS RENWARIN [01:55]**

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Pihak Terkait 306?

**28. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ALBERTH RUMBEKWAN [02:01]**

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Baik. 229 Pihak Terkait?

30. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [02:06]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Baik. Kemudian Pihak Terkait 229 ... sekarang 285?

32. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17]

Baik. Sudah komplit berarti, ya? Ya, saya kira tadi laporannya belum ada yang ... ada yang tidak komplit. Kalau belum ada yang komplit, dimulai yang sudah komplit dulu biar revolusi tetap berjalan, ya.

Agenda pada siang hari ini adalah mendengarkan Jawaban Termohon, Kemudian keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Disampaikan pokok-pokoknya saja. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. Baik, kita mulai (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [02:52]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]

Yang mana?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [02:56]

Dari Pemohon 285, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Pemohon belakang itu, kenapa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:00]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan bukti kami.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:09]

Bahwa sebagaimana sidang sebelumnya, Yang Mulia, disampaikan di persidangan, bahwa batas terakhir (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

12.00?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:15]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Ya, terus?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:16]

Akan tetapi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, kami ke Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan tambahan bukti kami.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:28]

Akan tetapi kami terlambat karena adanya antrian, Yang Mulia. Sehingga kami tidak menyampaikan tepat pada pukul 12.00 atau sebelumnya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Antriannya, antrian apa itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:42]

Antriannya kami diarahkan untuk NUPK, Yang Mulia. Karena di bagian registrasi menyampaikan bahwa (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

NUPP-nya yang anu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:51]

Ya, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Terus?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [03:52]

Untuk konsultasi. Hari ini Yang Mulia, izin (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]

Itu katanya NUPP-nya ngambil NUPP anu ... konsultasi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:00]

Ya, karena diarahkan di petugas, Yang Mulia, untuk konsultasi dulu. Karena pada saat itu tidak ada jadwal sidang, kemudian mau memasukkan bukti tambahan, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Oke. Terus akhirnya NUPP penyerahan buktinya jam berapa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:17]

Untuk NUPP penyerahan bukti, Yang Mulia. Pada saat itu tidak diambil karena diarahkan untuk mengambil NUP Konsultasi, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Oh, NUPP-nya konsultasi.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:28]

Tapi, jam pukul berapa itu?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:29]

10.41, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Oh, 10.41. Masih dalam batas berarti?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:33]

Masih dalam batas, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]

Sudah diserahkan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:36]

Hari ini kami bawa dan apabila diizinkan, Yang Mulia. Bukti (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39]

Tapi betul NUP-nya itu, NUP-nya pukul ... sebelum pukul 12.00?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:43]

Sebelum pukul 12.00, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Oke, ada buktinya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:46]

Ada buktinya kami bawa, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

NUP-nya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [04:48]

Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Oke. Coba diambil petugas!
Berapa banyak itu? P berapa sampai P berapa?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [05:03]

P-82 sampai P-92, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:07]

P-82 sampai 92?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [05:09]

Ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:10]

Bukti tambahan berarti, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [05:12]

Ada bukti.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Ada NUPP-nya segala, ya? Jadi bukan bukti, ya. Buktinya mana? Ya, dengan buktinya, semuanya sekalian di serahkan, dibawa ke belakang biar diverifikasi.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIZAL [05:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Ya. Kita mulai KPU Tolikara (...)

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [05:42]

Izin, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:44]

Di mana lagi?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [05:45]

Tolikara, tambahan ... bukti tambahan, Pihak Terkait.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:48]

Pihak Terkait, satu hari sebelum. Apa yang jadi masalah?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [05:57]

Izin, Yang Mulia.

Kami melengkapi yang kemarin ... tidak sempat di ... apa ... ada ... belum sempat diserahkan. Tapi sudah masuk daftar alat buktinya, kemudian beberapa sudah ada masuk.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:14]

Itu daftar alat bukti yang berapa? Nomor berapa itu? PT berapa?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [06:20]

Izin, Yang Mulia. PT-4, PT-14, PT-15, PT-18, PT-19, PT-20, PT-22 (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:32]

Samapi PT-24, itu?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [06:34]

Benar, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Oke. Di daftar buktinya sudah ada, tapi bukti fisiknya yang belum ada?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [06:40]

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:41]

Ya. Diambil! Sudah dileges, itu?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [06:49]

Sudah, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:09]

Ya. Amplop uangnya diambil, jangan dikasih kan ke sini. Di sini sudah banyak uang.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [07:15]

Siap, Yang Mulia. Kemudian, Yang Mulia. 303 dan 306 juga, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:25]

303 dan 306?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [07:28]

Benar, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]

303 dan 306 ada yang belum diserahkan, bukti fisiknya? PT-10 sampai PT-19? Ya, tapi didaftar sudah ada, PT-10 sampai PT-19?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [07:37]

Benar, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:50]

Oke. Kok enggak sekalian tadi, ah? Bolak balik saja.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [07:56]

Dengan 30 ... 36 ... 306 juga, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Ya.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [07:59]

Satu perkara, ya.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Ya. 306 PP-nya mana? 306, satunya? 303.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:11]

303, 306, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:14]

303, berapa yang belum diserahkan? PT-1, PT-2, ini? Sudah. Yang belum, PT berapa?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:26]

PT-1, PT-2, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:32]

Itu sudah. Yang belum kok. Ini sudah ada di sini, PT-1, PT-2, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-12, PT-17, sudah ada. 8 alat bukti. Apa lagi?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:46]

Se (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Kok kaya sekali punya PT banyak?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [08:51]

Tidak, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:52]

Ha? BUMN 1 untuk PT ini. Kalau ini kok PT-nya banyak ini. Sudah ... sudah kan PT-3 ... anu ... Perkara 303?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:07]

Sudah, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:17]

Oh, yang belum. Itu yang belum PT berapa, itu tadi? PT-4 dan kawan-kawan?

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:22]

Benar, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

Oke. Ya, sudah. Biar dicek dulu.
Baik, dimulai.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [09:31]

Mohon izin, Yang Mulia.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Apa lagi?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [09:32]

Pemohon dari 306.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:36]

Kenapa?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [09:36]

Kami juga menginginkan ... apa ... untuk menyampaikan ... kalau diperkenankan, untuk menyampaikan alat bukti tambahan. Dan juga ... apa ... perbaikan (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:45]

Bukti tambahannya sudah masuk belum itu?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [09:45]

Alat bukti.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Ha? Kalau belum ada daftarnya, belum apa-apa itu sudah enggak boleh.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [09:51]

Kalau untuk perbaikan alat bukti, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:54]

Ha?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [09:54]

Yang kemarin P-5 sampai dengan P-10, kan ada tulisannya yang tidak terbaca. Ini kami mau memperbaiki Alat Bukti P-5 sampai dengan P-10. Apakah diperkenankan?

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Itu sudah ada? P-1 ... P berapa nomornya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [10:09]

P-5 sampai dengan P-10.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:11]

P-5 sampai dengan P-10. Ya, coba dicek dulu, Pak. Di sini ada tulisan P-1 sampai dengan P-22.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [10:22]

Ya, namun yang kemarin ada yang tidak terbaca, alat bukti kami karena scan-nya kurang jelas terbaca karena tulisan tangan, itu P-5 sampai dengan P-10.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]

P-5 sampai dengan P-10?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [10:33]

Ya.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:34]

Ya, sudah diserahkan saja.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [10:35]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:37]

Yang lain masih ada? Diambil.

Ini sebetulnya sudah diserahkan pada 16 Januari, ya. Tapi tidak terlihat pada waktu disahkan terus diminta untuk memperbaiki, ya. Ya, betul itu. Diperbaiki, ya, berarti.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [11:21]

Ya, betul, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:22]

Baik.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [11:23]

Terima kasih.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]

Ya. Sudah, enggak ada yang lain? Cukup, ya? Baik, kita mulai.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: HABEL RUMBIAK [11:30]

Izin (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]

Apa lagi?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: HABEL RUMBIAK [11:30]

Izin, Yang Mulia. Masih ada. Dari 229, kemarin kami sudah serahkan seluruhnya, bukti.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:36]

He eh.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: HABEL RUMBIAK [11:40]

Cuma kekurangan flash disk-nya, softcopy. Mohon izin, nanti mungkin sebentar.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:42]

Oh ya, kalau itu gampang sih, ya.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: HABEL RUMBIAK [11:43]

Ya.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

He eh.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: HABEL RUMBIAK [11:45]

Nanti kami susulkan sebentar, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:47]

Ya, nanti, ya.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: HABEL RUMBIAK [11:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:49]

Baik. Sekarang KPU Tolikara, ini ada 3 keterangan atau 1 keterangan?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [11:56]

Karena KPU Tolikara ada 3 Permohonan, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:59]

Ya.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:00]

Tapi kami untuk masing-masing Permohonan tetap buat jawaban, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:04]

3?

156. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:05]

3, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:06]

Tapi, ada intinya yang sama dan ada yang tidak sama kan, berarti kan?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:11]

Ada intinya yang sama, Yang Mulia. Secara spesifik, tapi ada beberapa di masing-masing Permohonan berbeda dalilnya, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:19]

Lh, ya. Maka itu, nanti yang sama tidak usah disampaikan, karena yang sama itu, untuk tiga-tiganya kan?

160. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:24]

Baik, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:25]

Yang beda-beda saja yang spesifik untuk masing-masing nomor Perkara sendiri, ya.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:31]

Baik, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:32]

Jadi, kita langsung aja tiga-tiganya.
Sekarang yang 297 dulu. Silakan. Jadi induknya kita pakai yang 297 dulu, nanti yang tidak ada di situ ditambahkan.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:46]

Assalamualaikum wr.wb.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:48]

Walaikumsalam.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [12:51]

Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pihak Termohon (KPU Kabupaten Tolikara). Saya sendiri Andi Jaya, terus di Perkara yang lain ada kawan saya Ahmad Tawakkal, dan yang satunya lagi ada kawan saya juga Arman dari Kantor Hukum AYP Lawfirm.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:16]

Ya.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [13:17]

Dan yang untuk dari KPU-nya sendiri yang hadir ada Ketua KPU, Pak Ketua Lutius Kogoya, dan dari bagian data Pak Denius Jikwa, dan bidang hukum sendiri Pak Musa Jikwa, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:36]

Ya.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [13:37]

Lanjut ke pembacaan Jawaban Termohon.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Ada Eksepsi?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [13:44]

Mengenai Eksepsi, Yang Mulia, di Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami berpikir bahwa Mahkamah Konstitusi benar, berwenang mewalili ... mengadili Perkara Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Hasil. Akan tetapi, Yang Mulia, dalam Permohonan Pemohon a quo (...)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:04]

(suara terdengar tidak jelas)

174. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [14:04]

Substansi Permohonannya adalah pelanggaran administrasi pemilihan, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:09]

Ya.

176. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [14:09]

Sehingga patut kiranya Permohonan Pemohon dianggap tidak (...)

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:15]

Tidak berwenang?

178. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [14:16]

Siap, Yang Mulia.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:17]

Ya, terus?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [14:20]

Mengenai Kedudukan Hukum. Menurut Pemohon ... menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:28]

Ya, lebih anu (...)

182. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [14:29]

Alasan yang pertama, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada advokat harus disertai fotokopi kartu advokat yang masih berlaku.

Sekadar mengingatkan, Yang Mulia. Bahwa pada saat pembacaan Permohonan di pemeriksaan sid ... persiapan sidang yang terdahulu, Pemohon tidak memperbaiki atau tidak melakukan pembetulan terhadap Permohonan Pemohon. Sehingga patut kiranya Permohonan Pemohon yang terdahulu, yang tidak dibetulkan dianggap sebagai Permohonan Pemohon yang kami tanggapi sekarang ini, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia (...)

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:16]

Jadi menurut Anda yang tidak berwenang itu advokatnya?

184. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:21]

Advokatnya, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:22]

Tapi, Prinsipalnya berwenang apa enggak?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:25]

Prinsipalnya berme ... berwenang, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:27]

Ya, terus gimana? Ini memenuhi yang 158, apa enggak?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:32]

Kalau per ... pendapat kami, Yang Mulia. Kalau memenuhi 158 sepanjang Prinsipalnya yang mengajukan, memenuhi, Yang Mulia.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:40]

Masa (...)

190. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:41]

Memenuhi syarat.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:41]

297 memenuhi syarat, ambang batas?

192. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:45]

Oh, mengenai ambang batas, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]

Gimana ini?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:47]

Oh, selanjutnya mengenai ambang batas, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:49]

Kalau Paslon, memang Paslon.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:51]

Siap, Yang Mulia.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:52]

Ya.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [15:53]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, mengenai ambang batas, Yang Mulia. Karena Penduduk Kabupaten ko ... Tolikara berjumlah 251.661 jiwa, maka syaratnya sebesar 1,5 %, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:05]

Ya, 1,5.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:07]

Sementara, selisih jumlah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 19.734 suara, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:16]

Jadi, berapa persen itu?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:18]

10,3 %, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:19]

10,3. Jadi tidak (...)

204. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:21]

Tidak mencapai ambang batas 1,5 %, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:23]

1,5. Terus, ada lagi?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:26]

Selanjutnya, mengenai putusan-putusan yang digunakan oleh Pemohon sebagai putusan terdahulu. Pihak Termohon menyatakan bahwa putusan tersebut tidak relevan lagi untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:50]

Putusan-Putusan Mahkamah?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:52]

Siap, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:53]

Oke. Terus?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:55]

Tenggang waktu pengajuan Permohonan (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:58]

Dianggap (...)

212. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [16:58]

Bawa oleh karena tata cara penyelesaian sengketa usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan sudah lewat, Yang Mulia. Maka, Permohonan Pemohon tidak lagi memenuhi tenggang waktu, Yang Mulia.

Yang terakhir, di Eksepsi (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:15]

Eenggak (...)

214. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:15]

Baik, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:15]

Mengajukannya ke Mahkamah itu kapan?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:18]

Mengajukannya ke Mahkamah itu tanggal 18, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:21]

Itu tenggang waktunya itu tenggang waktu pada waktu mengajukan ke Mahkamah?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:26]

Baik, Yang Mulia.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]

Tapi substansinya bisa saja sebetulnya itu merupakan materi yang harus diselesaikan Bawaslu, boleh, begitu.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:35]

Siap, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:36]

Jadi, bukan masalah tenggang waktunya, tapi masalah kewenangannya (...)

222. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:39]

Baik, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]

Yang di Eksepsi.

224. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:40]

Baik, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]

Jangan dicampuradukkan, toh.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:42]

Siap, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:43]

Ya, kalau tenggang waktu masuk kan ini?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [17:46]

Masuk, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:47]

Lah, ya. Tadi bilangnya tidak masuk, itu gimana? Ya, ini ngaburkan ... anu ... apa ... prosesnya kalau gitu.

Jadi, yang dimaksud tenggang waktu itu adalah tenggang waktu pada waktu Pemohon mengajukan Permohonan di Mahkamah. Menurut undang-undang dan menurut PMK ada waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu kalau lewat, ya, lewat. Tapi dalam 3 hari kalau masuk, ya, masuk. Terus, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam 3 hari lagi, gitu. Itu yang dimaksud lewat tenggang waktu tuh di sini, bukan lewat tenggang waktu yang lain, kan.

Ya, terus?

230. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [18:32]

Baik, Yang Mulia.

Yang terakhir dalam Eksepsi, Yang Mulia. Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa tadi kami (...)

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Kabur.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [18:38]

Kami mengingatkan, Yang Mulia, kembali. Permohonan Pemohon terdahulu tidak diubah dan tidak ada pembetulan. Maka mengenai Permohonan Pemohon terkait penghitungan suara yang benar berdasarkan PMK, Pemohon sama sekali tidak mencantumkan perolehan suara menurut Pemohon, Yang Mulia.

Terus, yang (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:03]

Ya.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [19:03]

Terus yang kedua, Yang Mulia. Dalam permintaan mengadili juga, Petitem Pemohon dalam Permohonannya. Itu ada perbedaan atau tidak sistematis, Yang Mulia. Pemohon di angka 2, Pemohon memintakan didiskualifikasi. Akan tetapi di angka 4-nya, Pemohon tetap meminta mengubah hasil, perolehan hasil dengan tetap mengikutkan Pasangan Calon Nomor 4, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:33]

Apa ini berarti Petitemnya tidak konsisten atau apa (...)

236. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [19:36]

Benar, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Ya. Terus?

238. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [19:40]

Sehingga berdasarkan kesemua dalil Eksepsi Termohon di atas, Yang Mulia, mohon kiranya Yang Mulia Majelis yang kami hormati, menganggap bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:52]

Ya, terus sekarang (...)

240. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [19:53]

Selanjutnya, dalam Pokok Perkara. Pada prinsipnya, Yang Mulia, Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:01]

Ya, tolak nya yang (...)

242. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [20:03]

Bahwa dalil mengenai penghitungan suara sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 2, halaman 6, dan halaman 7 Permohonan Pemohon. Termohon telah melaksanakan mulai dari pendistribusian

logistik ke masing-masing TPS sampai dengan penghitungan suara di ... kembali ke KPU Kabupaten itu sesuai dengan peraturan perundangan, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Di Tolikara itu berlaku sistem (...)

244. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [20:31]

Sistem noken dan sistem nasional Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:33]

Oh, anu ... ada dua model?

246. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [20:36]

Baik, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:38]

Di mana yang berlaku sistem noken dan di mana yang berlaku seperti nasional, ada?

248. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [20:48]

Ada, Yang Mulia.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:49]

Di mana yang noken? Berapa?

250. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [20:52]

Kami ... kalau mengenai sistem noken dan nasional Yang Mulia, kami serahkan ke Ketua KPU.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:57]

Betul itu, KPU?

252. TERMOHON: LUTIUS KOGOYA [21:02]

Ya, benar.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:04]

Yang berlaku noken dimana saja, yang berlaku (...)

254. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:08]

Noken 46 distrik rata-rata sistem noken, terus ada 12 TPS kelurahan, 4 kampung, itu yang sistem nasional.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:19]

Sistem nasional 12 kelurahan?

256. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:21]

Benar.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:22]

Ini di Kota Tolikaranya ya.

258. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:23]

Benar, Distrik Karubaga.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:26]

Oh, Kota Tolikara distrik ... distrik apa namanya?

260. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:29]

Distrik Karubaga, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:32]

Karubaga. Terus yang lain, yang noken?

262. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:35]

Empat ... Distrik Karubaga, tapi yang ... yang lain sistem noken (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:39]

Yang desa, yang desa, yang bukan kelurahan.

264. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:41]

Bukan kelurahan, di desa.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]

Oke, berapa itu jumlahnya? Jumlahnya berapa yang noken?

266. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [21:51]

Yang 12 ... yang sistem nasional=12 TPS.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:55]

Ya, yang noken berapa ... anu ... berapa TPS? Ini 12 TPS atau 12 distrik?

268. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [22:03]

12 TPS, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:05]

Oh, 12 TPS. Itu kelurahan apa ... 1 TPS 1 kelurahan berarti?

270. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [22:14]

Ada yang 4, ada 2, ada 1.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:17]

Oh, ya makanya itu, sekarang saya tanya dulu. Yang 12 itu, 12 TPS atau 12 kelurahan?

272. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [22:27]

4 kampung, 4 desa, masing-masing ada 2 kelurahan, ada 6 TPS, masing-masing ada 1 TPS, ada 2 TPS. Jumlah (...)

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:45]

Yang di Karubaga semua itu?

274. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [22:48]

Ya, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:50]

Terus, yang noken dimana?

276. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [22:54]

Yang noken, yang di luar dari 12 TPS itu.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:59]

Nah, itu berapa, itu?

278. TERMOHON: LUTIOUS KOGOYA [23:05]

Distrik Karubaga saya belum hafal (...)

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:08]

Ya, dibaca saja kalau di situ. Itu dibantu Kuasa Hukumnya. Yang memformulasikan dalam jawaban itu kan ... anu ... Kuasa Hukum. DPT-nya ada berapa nih?

280. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [23:27]

Baik, Yang Mulia. Mengenai di Distrik Karubaga di ... ada memang benar ada 12 TPS yang sistem nasional Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Ya, yang tidak. Yang pakai noken itu berapa?

282. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [23:49]

Selain dari 12 TPS itu, Yang Mulia (...)

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:51]

Lha, ya, selain itu berapa? Berapa DPT di situ, itu?

284. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [24:11]

12.000 lebih DPT, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:14]

12.000 lebih. Terus bet ... kalau gitu ... ini ... ini yang kita harus tahu dulu kan? 12 itu yang ber ... berlaku one man one vote, sebagaimana Pemilu di daerah lain, nasional. Terus ada yang noken, yang noken di mana? Di berapa? Caranya noken gimana? Itu kan, harus jelas kan?

286. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [24:48]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, tadi.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:52]

Ya.

288. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [24:52]

Mengenai noken dan sistem nasional itu.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:56]

Ini anu ... untuk KPU mana, ini?

290. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [24:58]

KPU Tolikara, Pak.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:00]

Tolikara juga?

292. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:00]

Siap, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:01]

Oke. Sama kan, sebetulnya?

294. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:03]

Siap.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:03]

Kalau ini kan, sama kan?

296. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:04]

Siap.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:05]

Ya.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:05]

Jadi ... izin, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:08]

Ini jawabannya berarti untuk ... anu ... perkara berapa ini? 303?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:12]

303 tadi, dan (...)

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14]

Ya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:14]

297 juga (...)

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:15]

Lha, sekarang kalau Anda itu mau menjawab yang 303?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:19]

Mem ... melanjutkan yang 297, Yang Mulia.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:22]

Enggak, maksud saya, Anda itu Pengacara (Advokat), Kuasa Hukum untuk perkara berapa?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:28]

Untuk ... kami dari kantor hukum yang sama.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

He eh, tapi (...)

308. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:31]

Ya.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Untuk perkara berapa?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:32]

Untuk 303, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:33]

Nah, sekarang kita jawab yang 03 saja.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:36]

Baik, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:38]

Untuk jawabannya, enggak jelas. Jadi di sana berlaku sistem?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:41]

Sistem noken.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:42]

Noken dan?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:42]

Dan 12 TPS.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:45]

Sistem nokennya 12 TPS?

318. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:46]

Ti ... tidak, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:47]

Berapa?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:48]

Sistem nokennya berlaku di 46 distrik.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:52]

4 kelurahan?

322. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:53]

4 ... 46 distrik kecamatan, Yang Mulia.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:57]

Ya, itu dis ... baik. Terus?

324. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [25:59]

Kemudian, khusus di Distrik Karubaga sebagai Ibu Kota Kabupaten Tolikara.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]

Ya, Ibu Kota Tolikara itu berlaku one man one vote?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:07]

Itu ada ... ada 12 TPS di distrik tersebut, berlaku one man one vote, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:13]

Nah, gitu. Ini yang dimaksud di anu, itu ini. Terus DPT-nya berapa?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:18]

Kemudian, DPT-nya itu berjumlah 232.000.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:28]

232.000?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:30]

736, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:31]

736.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:34]

Baik.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:34]

Tadi kok, jawabannya berapa? 12.000 lebih? Ini 200?

334. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:40]

Total DPT se-Kabupaten Tolikara=232.000 (...)

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:46]

Ya.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:46]

736.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:47]

Ya. Oke, terus.
Sekarang untuk yang Eksepsinya sama?

338. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [26:56]

Ya, Yang Mulia. Tapi, izinkan kami dalam ... untuk (suara tidak terdengar jelas).

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:00]

Ini presentasenya berapa kalau yang di 303 dulu?

340. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:04]

Baik. Untuk 303, persentase yang digunakan di Kabupaten Tolikara itu 1,5%.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:12]

Sama, 1,5 kalau itu?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:15]

1,5%.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Sedangkan perolehan suaranya berapa persen?

344. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:18]

Sedangkan perolehan suara Pemohon itu berjumlah 45.136.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:27]

Ya, jadi berapa persentasenya?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:29]

Jadi, selisih suara Pemohon itu (...)

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:33]

Dan Pihak Terkait?

348. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:34]

Dan Pihak Terkait itu berjumlah 16.789.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:40]

Atau berapa persen?

350. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:42]

Kemudian, di-equivalent. Ini sedikit kami renvoi, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:46]

Ya.

352. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:46]

Kami keliru dalam menulis equivalent.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:48]

Ya.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:48]

2,7 ... 27,11%. Ini kami perbaiki menjadi equivalent-nya 8,80%.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:59]

8,80?

356. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [27:59]

80%.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Oke. jadi, ini (...)

358. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:01]

Melewati (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:02]

Ambang batas?

360. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:02]

Melewati ambang batas yang dipersyaratkan (...)

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:04]

Ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:05]

Berdasarkan penggarisan ketentuan Pasal 158.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:08]

Baik. Terus, apa lagi?

364. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:11]

Kemudian saya teruskan, Yang Mulia, untuk 303.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:15]

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:16]

Untuk obscur libel.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Ya.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:22]

Itu di halaman 17, Jawaban Termohon. Menurut Termohon, Pemohon kabur dalam bagian Petitum Permohonannya.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:38]

Oh, yang kabur dalam Petitum?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:40]

Baik. Pada halaman 20, angka 3, sampai dengan halaman 21, angka 4 Permohonan a quo. Pemohon di ang ... di angka tersebut, di

angka 3 dan 4 menetap ... meminta, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan hasil suara Pemohon berdasarkan versi Pemohon. Dan di angka 4, juga meminta pemungutan suara ulang. Sedangkan (...)

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:14]

Jadi (...)

372. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [29:15]

Pada ... pada dalil Petitum tidak bersifat alternatif, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:18]

Ya. Kesimpulannya berarti (...)

374. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [29:20]

Obscur libel.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:21]

Antar-Petitum terjadi inkonsistensi?

376. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [29:23]

Inkonsistes ... inkonsistensi.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:25]

Ya, itu dulu. Karena inkonsisten, maka kabur. Begitu, kan?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:31]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:32]

Ya. Terus, apa lagi?

380. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:34]

Langsung ke dalam Pokok Permohonan.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:36]

Pokok Pemohonan, gimana?

382. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [28:38]

Pada dalil pokok dalam Permohonan Pemohon a quo untuk Perkara 297, 303, dan 306 itu pada ... pada umumnya itu sama, Yang Mulia. Di angka 3 di Permohonan 303 kami menjawab ... Termohon menjawab. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak melakukan rekapitulasi di 6 distrik merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:23]

Semuanya dilakukan berarti rekapitulasi?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [30:25]

Semua dilakukan, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:26]

Oke.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [30:27]

Untuk peristiwa rekapitulasi berjenjang tersebut, itu dimulai oleh Termohon pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 6 Desember, bertempat di Gedung Aula GIDI, Distrik Karubaga.

Kemudian, jumlah distrik yang selesai diplenokan, yang pertama itu 12 distrik. Kemudian, ada beberapa penyelesaian keberatan, sehingga memerlukan Termohon untuk memperpanjang waktu rekapitulasi, itu dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Desember. Pada tanggal tersebut, Termohon menyelesaikan 24 distrik.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:19]

Sisanya?

388. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [31:20]

Sisanya.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:21]

Oke.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [31:22]

Kemudian, selanjutnya di penambahan waktu tersebut menjadi 22 distrik sampai dengan tanggal 14 Desember.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:33]

Ya.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [31:34]

Di tanggal 15 Desember, jumlah distrik yang telah diselesaikan itu berjumlah 33 listrik.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:43]

Oke.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [31:45]

Namun karena alasan pertimbangan keamanan, maka rekapitulasi tingkat kabupaten/kota itu dipindahkan ke Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:01]

Oke, terus dialihkan ke Wamena.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [32:02]

Ya. Setelah dialihkan itu ... selanjutnya Termohon telah menyelesaikan seluruh dari 46 distrik itu, berjumlah 40 distrik. Untuk selesai, tersisa 6 distrik yang didalilkan oleh Pemohon a quo. 6 distrik ini, pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 sebagai wa ... batas waktu rekapitulasi bagi Termohon sebagaimana penggarisan Ketentuan PKPU 2 Tahun 2024 dan juga ada surat edaran dari KPU RI yang memerintahkan kepada Termohon untuk menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tolikara. Maka 6 distrik yang kami sudah buktikan di T-16 dan T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24 karena seluruh pasangan calon meminta kepada panitia pemilihan distrik untuk merekapitulasi perolehan hasil suara, itu berdasarkan versi masing-masing calon. Itu nanti kami

akan perlihatkan, Yang Mulia, mengenai persandingan dan pengandainya, apabila Termohon mengikuti kehendak masing-masing pasangan calon.

Jadi, seluruh pas ... saksi Paslon memaksakan kehendaknya untuk PPD di 6 distrik ini, yaitu PPD Aweku, PPD Airgaram, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan versi masing-masing calon. Maka pada tanggal 16 Desember sebagai batas akhir waktu untuk melakukan rekapitulasi, Termohon melakukan Rapat Pleno dan memutuskan dalam Bukti P-7, merekap suara 6 distrik yang tadi tidak memi ... apa ... tidak ada titik temu untuk ini, merekap sebagai suara tidak sah. Itu kami sudah ada di Bukti T ... berturut-turut di Bukti T-2 ... T-19, T-20, T-21, T-22, dan T-23, Yang Mulia. Jadi, model D.Hasil distrik direkap sebagai suara tidak sah, kemudian oleh Termohon dicatatkan ke dalam Model D.Hasil distrik, Kab/Ko-KWK Bupati juga sebagai suara tidak sah untuk 6 distrik tersebut. Dengan beberapa alasan tadi, Yang Mulia.

Yang pertama. Termohon tunduk dan patuh terkait waktu penyelesaian sebagaimana penggarisan ketentuan PKPU Nomor 2.

Yang kedua. Termohon menaati dan melaksanakan secara konsisten serta bertanggung jawab surat edaran KPU RI. Kemudian (...)

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:27]

Saya ulangi ... saya ulangi.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:29]

Ya, ya.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:30]

Saya ... anu ... saja ... biar jelas, ya.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:32]

Siap.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:33]

Saya tuntun, ya. Di sana jadinya ada berapa distrik yang sudah direkap?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:39]

Seluruh distrik sudah direkap, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:41]

Seluruh distrik direkap (...)

404. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:43]

Seluruh direkap.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:44]

Tapi yang dianggap tidak sah, 6 distrik?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:47]

Ya, Yang Mulia. Yang mana seluruh versi Paslon berbeda-beda akhirnya PPD (...)

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:52]

Diambil kesimpulan dan semua sepakat (...)

408. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:54]

Sepakat.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:54]

Yang 6 distrik ini (...)

410. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:56]

Direkap.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:57]

Tidak sah (...)

412. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:57]

Direkap sebagai suara tidak sah, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:59]

Oke.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [35:59]

Baik. Dengan alasan-alasan yang ... dianggap dibacakan.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:05]

Ya.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [36:05]

Yang perlu saya bacakan, Yang Mulia, adalah pada bagian persandingan data. Kiranya dengan pengandaian yang menggunakan nalar yang wajar, apabila Termohon mengikuti angka perolehan suara masing-masing calon, ada di halaman 43, Yang Mulia.

Paslon 1 berdasarkan versi, memperoleh ... di 6 distrik ini, memperoleh 37.200 (...)

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:39]

Yang 6 distrik itu, Distrik Aweku, Wugi, Airgaram, Kembu, Yuneri?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [36:42]

Aweku, Wugi, Airgaram, Kembu, Yuneri, dan Nunggawi, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:47]

Oke. Itu jadi (...)

420. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [36:48]

Termohon, ya.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:49]

Tidak ... tidak ... anu ... ya, dianggap tidak sah, ya?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [36:52]

Siap, Yang Mulia. Dianggap ... direkap sebagai suara tidak sah.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:55]

Oke.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [36:56]

Kami mencoba memberikan gambaran untuk versi Paslon 01 di 6 distrik yang direkap sebagai suara tidak sah tersebut. Paslon 1 memperoleh ... menurut versi Paslon 1=37.233.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:14]

Ya.

426. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [37:15]

Menurut (...)

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:15]

Nomor urut (...)

428. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [37:15]

Paslon 2=12.349 (...)

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:17]

12.000, itu?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [37:20]

Menurut Paslon 3=23.252.

Dan menurut Paslon 4, sebagai Pihak Terkait ini, memiliki (...)

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:28]

Jadi (...)

432. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [37:28]

15.96 ... 6 ... 64. Tabel pengana ... pengandaiannya, Yang Mulia. Ada pada halaman 46.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:39]

Total ... total suara sahnya berarti ... total suaranya berarti, 27 itu? Jumlah antara yang sah dan yang tidak sah?

434. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [37:47]

Jadi ... ya, betul, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:48]

Ya, toh?

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:49]

Jadi setelah kami membuat tabel pengandaian, pada tabel Nomor 7 ... angka 7. Paslon Nomor Urut 1=41.432. Apabila ditambahkan berdasarkan versinya, maka akan mendapatkan 78.665.

Begitupun pada Paslon Nomor Urut 2=42.191. Apabila ditambahkan dengan versinya, berjumlah 54.540.

Paslon Nomor Urut 3=45.136 versi Termohon. Apabila ditambahkan dengan 6 distrik berdasarkan versi Pemohon (Paslon 3) atau Pemohon pakat ... Perkara 303, maka jumlahnya ber ... 68.388.

Kemudian Paslon Nomor Urut 4 sebagai Pihak Terkait, enam ... menurut Termohon=61.925. Apabila ditambahkan dengan versi atau mengikuti versi Saksi Paslon Pihak Terkait, maka jumlahnya 77.889.

Maka, hasil ini akan melebihi jumlah DPT di Kabupaten Tolikara, Yang Mulia.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:53]

Malah melebihi?

438. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [38:53]

Melebihi.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:56]

Ya.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [38:56]

Jadi, total jumlahnya itu 279.482. Apabila mengakomodir ... apa ... kehendak dan (...)

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:04]

Makanya, terus itu yang ditambahkan itu, semua dinyatakan tidak sah?

442. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:08]

Baik, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Ya, kan?

444. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:10]

Yang ditambahkan itu dinyatakan tidak sah, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:12]

Setelah dinyatakan tidak sah, suara yang sah, itu yang di halaman 48 itu?

446. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:16]

Baik, Yang Mulia. Akhirnya, setelah di halaman 48. Telah ditetapkan oleh Termohon, itu berjumlah ... seluruh suara sah itu berjumlah=190.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:29]

Hanya 190?

448. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:30]

Siap, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:31]

Kalau 190, DPT-nya berapa di situ?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:34]

DPT di jumlah 190 itu (...)

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

Kalau yang itu, kan (...)

452. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:41]

Ya.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:42]

Melebihi?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:43]

Ya, betul.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:43]

Melebihi DPT.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:44]

Ya.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:44]

Kalau yang 279?

458. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:47]

Betul.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:48]

Tapi, kalau ini 190 ini, masih di bawah DPT-nya?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:52]

Masih di bawah DPT, Yang Mulia. Yang seluruh (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

DPT-nya, berapa sebetulnya?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [39:55]

DPT keseluruhan Kabupaten Tolikara itu berjumlah 232.736.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:05]

Oke.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:06]

Bukti T-5 kami, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:07]

Jadi, suara yang benar itu halaman 48 itu?

466. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:10]

Halaman 48, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:11]

Berarti yang unggul Pasangan Nomor Urut 4?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:14]

Nomor Urut 4, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:16]

Ini hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Torikara?

470. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:19]

Di tingkat Kabupaten Torikara, setelah 6 distrik ini direkap sebagai suara tidak sah.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:24]

Suara tidak sah.

472. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:25]

Siap, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Dan itu disepakati?

474. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:27]

Disepakati oleh seluruh Termohon dan distrik ... PPD distrik.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Ya.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:35]

Baik, Yang Mulia (...)

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:36]

Ada buktinya?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:37]

Ada buktinya, Yang Mulia. Ada di bukti ... untuk berita (...)

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:41]

Bukti kesepakatan juga ada?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:43]

Kesepakatan ... maksudnya, Yang Mulia?

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:46]

Kesepakatan yang dibuang itu, yang dianggap tidak sah, juga ada?

482. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:48]

Untuk ... untuk kesepakatan yang pleno Termohon (...)

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:51]

Ya.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:52]

Itu ada, Yang Mulia, di Bukti T-7.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:55]

T-7?

486. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:56]

Ya.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:56]

Oke.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [40:57]

Berita Acara tentang penetapan perolehan ... ya, tentang Penetapan Perolehan Hasil pada Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Wugi, distrik ... untuk membuktikan bahwa terhadap perolehan suara pada 6 distrik, yaitu Distrik Aweku tersebut telah dilakukan proses rekapitulasi yang diitung sebagai suara tidak sah.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:18]

Berarti?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [41:19]

Ada ... ada dari Termohon, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]

Kalau begini kan, berarti sudah selesai semua?

492. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [41:23]

Selesai semua, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:24]

Yang 297 juga sudah terjawab ini, kan?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [41:26]

Baik. Kemudian, Yang Mulia, salah satu dasar Termohon untuk menetapkan itu semua, ada di Bukti kami di T-16. Jadi (...)

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:36]

Ini ada KPU ... satu KPU, Keties Wenda, kok enggak tanda tangan, kenapa?

496. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [41:43]

Saya kalau yang mengenai itu, Yang Mulia, saya ... langsung saja mungkin di ... bisa dijelaskan oleh Komisioner, ya.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:51]

Siapa yang bisa ... bisa menjawab? Ini Litius Kogoya tanda tangan, Musa Jikwa tanda tangan, Yunius Wonda tanda tangan, Denius Yikwa tanda tangan, yang Keties Wenda tidak tanda tangan.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [42:06]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:07]

Ya.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [42:08]

Karena kami juga sempat kemarin berbicara dengan yang bersangkutan. Bahwa dala ... di rangkaian rekapitulasi, Yang Mulia, yang panjang itu, pada saat dilaksanakannya pleno, yang bersangkutan tidak hadir karena kurang enak badan katanya, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:33]

Oke.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [42:34]

Izin, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:35]

Jadi, waktu pleno tidak hadir (...)

504. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [42:37]

Ya.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:37]

Karena sakit?

506. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [42:38]

Karena, Yang Mulia ... izin, Yang Mulia, penyampaian beliau karena di-range itu katanya kurang tidur, Yang Mulia, makanya beliau tidak sempat tanda tangan. Tapi (...)

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Tapi kemudian setelah selesai (...)

508. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [42:50]

Menyepakati, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:51]

Tapi tidak tanda tangan tetap?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [42:52]

Tetap tidak tanda tangan, Yang Mulia.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:54]

Oke. Ya, Berita Acara 505 Penetapan Perolehan Hasil. Ya ... ya, sudah kalau begitu sudah selesai semua untuk anu ... KPU. Karena suaranya kan sudah ini yang menurut KPU yang benar, kan, ya?

512. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [43:14]

Baik, Yang Mulia. Sudah ... sudah direkap. Betul, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:17]

Lah, ya. Ini tidak melebihi DPT, ya?

514. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [43:21]

Tidak melebihi DPT, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:22]

DPT-nya tadi 200 berapa?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [43:24]

2 ... 200 (...)

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:26]

237? Eh, 32?

518. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [43:28]

Ya, 232.736.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]

736.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [43:33]

Siap, Yang Mulia.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

Oke, ya.

Sekarang ke Pihak Terkait. Silakan, Pihak Terkait.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [43:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, wa, wa, wa.

Perkenalkan, saya Irwan Gustaf Lalegit (Kuasa dari Prinsipal kami Bapak Willem Wandik dan Bapak Yotam Wonda yang hadir di samping kanan saya.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:08]

Ya.

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [44:09]

Pasangan Nomor Urut 4 untuk Bupati dan Wakil Bupati Tolikara. Bapak Yotam berhalangan hadir, dia dali ... dari secara online, Yang Mulia. Hadir juga Kuasa rekan saya Bapak Aloysius Renwarin dan Bapak Alberth Rumbekwan, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Ini untuk 3 Perkara sekaligus bisa, kan?

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [44:38]

Benar, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:39]

Ya, gimana? Anda menyetujui apa yang disampaikan oleh Pihak Termohon?

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [44:46]

Untuk 297, Yang Mulia, 303 dan 306 untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Ya, tidak berwenang karena tidak menyangkut angka-angka itu, ya.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [46:04]

Betul, Yang Mulia.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:05]

Terus apa lagi?

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [46:06]

Kemudian, Pemohon juga telah salah menulis objek perselisihan. Bisa dilihat di halaman 1 itu perihal. Pemohon menulis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tanpa tahun, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Seharusnya yang benar, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024 dan seterusnya.

Kemudian menurut Pihak Terkait, Pemohon walaupun objeknya adalah seolah-olah Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Akan tetapi materi substansinya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sehingga Pemohon a quo yang substansi mengenai ada pelanggaran tidak memenuhi syarat menurut Pihak Terkait.

Kemudian, di bagian angka I Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak membuat penjelasan mengenai Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, secara tersirat dalam Permohonannya, Pemohon memang mendalikan perhitungan suara versinya yaitu pada posite Posita Permohonan poin 4 halaman 8 dan poin 5 halaman 8 sampai 10 dan (...)

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:45]

Itu, anu ... penjelasan-penjelasan itu mau menunjukkan apa itu? Mahkamah tidak berwenang?

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [46:50]

Benar, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

Ya, sudah dianggap dibacakan.

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [46:52]

Baik. Selanjutnya Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon juga tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

Ya. Sekarang presentasinya, kalau dengan Perkara 297, presentasinya?

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [47:10]

10,3, Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]

10,3.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [47:13]

Sama dengan Termohon.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Termohon.
Kalau yang ini 303?

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [47:18]

Sama dengan Termohon juga, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:19]

Berapa itu? Tadi Termohon belum ... anu ... menyampaikan 8,80?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [47:25]

Benar, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:27]

Sama, ya.
Terus kemudian yang terakhir di perkara ini, 306?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [47:36]

Yang Mulia.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:37]

Ya.

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [47:48]

Terima kasih.
Saya Alberth E Rumbekwan. Yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:50]

Eenggak, ini saya tanya dulu itu ... anu ... sambil anu (...)

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [47:53]

Oh, ambang batas.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:54]

Khusus ambang batasnya, selisihnya berapa? 306?

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [47:58]

Sebentar, Pak. Ambang batasnya 32,48%.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Berapa?

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [48:11]

32,48%.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:12]

32 koma?

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [48:14]

48%.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:15]

48%. Berarti, ini paling jauh selisihnya?

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [48:19]

Ya.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:20]

Oke. Terus, kembali ke (...)

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:24]

297, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:25]

Ya.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:25]

Eksepsi mengenai Permohonan Pemohon kabur (obscur). Dimana Pemohon tidak jelas karena ada beberapa kesalahan penulisan yang sangat serius.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:37]

Ya.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:38]

Dan terdapat pertentangan antara Posita dan Petitem, dan pertentangan antara Petitem, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:44]

Ini yang 303 dulu, ya?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:46]

297.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

297?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:48]

Benar, Yang Mulia.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Kabur?

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:51]

Betul.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:52]

Oke. Terus yang anu ... 303?

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:58]

303 juga begitu, Yang Mulia, ada (...)

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Kabur?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [49:01]

Kabur.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:02]

Terus yang 306? Ada Eksepsi kabur?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [49:08]

Ada, Pak.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:08]

Apa kaburnya? Dimana kalau ini?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [49:11]

Ini Pihak Pemohon tidak konsisten dalam Petitumnya.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:20]

Tidak konsisten di Petitum? Baik.
Sekarang saya tanya untuk 297.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [49:28]

Baik, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:29]

Tenggang waktunya, gimana? Masuk, ya?

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [49:31]

Masuk, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:32]

Kemudian 303, Tenggang waktunya? Masuk juga?

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 303/PHPU.BUP-XXIII/2025: AHMAD TAWAKKAL [49:36]

Masuk.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:37]

Masuk.

Terus kemudian, yang 363 tenggang waktunya, gimana ... oh, 306?

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [49:45]

Tidak ... Tidak, Pak.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:47]

Tidak masuk?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [49:47]

Ya.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:48]

Ini lewat tenggang waktu berarti?

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [49:49]

Ya.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:50]

Oke, baik. Terus, dalil-dalil yang ... anu menurut (...)

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:09]

Dalam (...)

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:09]

Pokok Permohonan yang 297, gimana?

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:12]

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Ya.

596. KUASA HUKUM TERMOHON 303: AHMAD TAWAKKAL [50:14]

Pada intinya, Pemohon mempersoalkan suara di 6 distrik, tadi yang sudah disampaikan oleh (...)

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:22]

Termohon?

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:23]

Termohon. Dan kami memiliki klaim (...)

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:26]

Sama?

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:26]

Yang sa ... yang sama, yang bahwa kami (...)

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:29]

Oke. Jadi yang 6 distrik tadi, sebetulnya sudah ada kesepakatan untuk dinyatakan sebagai suara tidak sah?

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:36]

Benar, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:37]

Oke, semuanya begitu? Untuk 306 dan ... anu?

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:41]

Ya, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Sama, ya?

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:44]

Kami juga melengkapi dengan (...)

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:46]

Bukti?

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:46]

Alat bukti.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:47]

Buktinya apa?

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:48]

PT ... alat bukti kami, Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:51]

Ya.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:52]

Berupa kronologi pengamanan logistik pemilihan Gubernur, Wakil Bupati ... Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun (...)

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:57]

He eh. PT berapa itu?

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [50:59]

PT-23 sampai 28, Yang Mulia.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:02]

23 sampai 28, oke.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [51:04]

Kami juga sebenarnya memiliki kesepakatan noken ikat dari kepala-kepala suku.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:10]

Ya.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [51:11]

Tapi, kami tidak ajukan, Yang Mulia. Nanti, mungkin kami akan ajukan sebagai tambahan, jika diizinkan.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:22]

Ya, nanti kalau masuk sidang pembuktian bisa ditambahkan.

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [51:25]

Baik, Yang Mulia.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:25]

Kalau enggak, sudah diselesaikan, ya, toh?
Terus apa lagi yang mau disampaikan?

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [51:31]

Soal rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia. Sama dengan 303 dan 306 juga, Yang Mulia.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:37]

Nanti Bawaslu-nya gimana, ya.
Ada rekomendasi Bawaslu menurut Pihak Terkait?

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [51:43]

Kalau kami ada, Yang Mulia.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:45]

Rekomendasinya gimana? Itu juga diketahui oleh Bawaslu pada waktu 6 distrik yang dinyatakan tidak sah itu?

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [51:55]

Ya, diketahui.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:55]

Ya, Bawaslu nanti direspons, ya, Bawaslu Tolikara. Mana itu Bawaslu Tolikara? Ya, nanti direspons, ya.

628. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [52:04]

Siap, Yang Mulia.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:05]

Itu yang 6 distrik, dinyatakan tidak sah suaranya. Oke, nanti direspons. Terus, apa lagi?

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:13]

Jadi, ada pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dan semua sudah kami jawab, Yang Mulia.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:20]

Ya.

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:21]

Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak ada penyelesaian ... apa (...)

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:39]

Tidak ada bukti, ditolak.

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:32]

Ya, betul. Jadi, Pemohon tidak melampirkan juga bukti di Permohonannya.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:37]

Oke.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:41]

Kami kira tiga perkara sama, Yang Mulia.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:43]

Ya, sama ya.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:45]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]

Dianggap dibacakan, ya. Baik.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:47]

Petitum.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:49]

Petitumnya sama.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:50]

Baik, Yang Mulia.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:51]

Ya, Petitumnya suara sah berarti sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon itu?

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [52:55]

Betul, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:56]

Ya, kan? Yang disebutkan oleh suara Pemohon Petitumnya,
Pasangan Nomor 1=41.432.
Pasangan 2=42.191.
Pasangan 3=45.136. Dan,
Pasangan Pihak Terkait=61.92 (...)

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [53:17]

5.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]

2 .. 9 ... 925.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [53:20]

925, ya. Betul, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:20]

Betul. Terus total suara sah 190.684.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT [53:27]

Benar, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:28]

Oke, baik. Sekarang, Bawaslu.

Bawaslu Tolikara, gimana? Yang jadi persoalan sebetulnya itu tadi, yang utama. Apakah betul, ya, ada daerah yang noken dan daerah yang one man one vote itu dijawab. Betul apa enggak?

652. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [53:51]

Betul, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:52]

Betul. Terus ada persoalan mengenai rekapitulasi di 6 distrik yang disebutkan tadi. Betul?

654. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:01]

Betul, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:02]

Terus akhirnya diambil kesepakatan, 6 distrik itu suaranya dinyatakan tidak sah.

656. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:10]

Jika diperkenankan, saya akan membacakan (...)

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]

Enggak, betul apa enggak dulu, nanti saya perke ... silakan.

658. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:16]

Untuk suara tidak sah memang pada saat itu tidak terjadi kesepakatan, cuma dianggap sudah diselesaikan karena batas waktu.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:27]

Oke. Dianggap sudah selesai karena batas waktunya, sehingga kemudian dinyatakan tidak sah itu?

660. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:33]

Ya.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:34]

Silahkan kalau mau dibacakan, apa? Berapa halaman yang dibacakan itu?

662. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:38]

Enam halaman, Yang Mulia.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:40]

Ya, jangan banyak-banyak kalau enam halaman. Itu untuk tiga-tiganya?

664. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:45]

Sendiri sendiri, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:46]

Oke, kan ini persoalannya yang utama kan itu tadi, rekapitulasinya yang 6 distrik itu betul apa enggak?

666. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [54:56]

Yang untuk yang 6 distrik, rekapitulasinya memang benar, Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:00]

Benar.

668. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [55:00]

Itu hasilnya ... hasilnya tidak dibacakan karena kosong hasilnya.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:06]

Oke. Terus apa yang anu mau disampaikan? Coba satu-satu apa yang beda itu apa, yang sama apa, yang beda apa?

670. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [55:17]

Jika diperkenankan, kita akan membacakan resumennya biar lebih jelas.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:21]

Oh enggak, maksud saya yang mau ditulis itu kan ada yang sama, ada yang beda. Karena daerahnya sama kan semuanya Tolikara kan?

672. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [55:29]

Ya, sama.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:30]

Ya, terus yang mau dibacakan, yang sama ada enggak? Dari ketiga keterangan itu.

674. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [55:36]

Ketiga ini kayaknya hampir sama semua.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:39]

Hampir sama semua, tapi ada yang beda?

676. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [55:42]

Perbedaannya di hasilnya.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:44]

Oke, apa coba dibaca untuk yang Perkara 297 dulu.

678. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [55:48]

Baik. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan resume Keterangan Perkara Nomor 297 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan dan ... Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan, Termohon dan rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti, pada angka 1 sampai dengan 8, halaman 5 sampai dengan 11, terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Tolikara sebagai berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara (...)

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:37]

Sebentar, sebentar. Itu ada temannya yang dari Tolikara belum masuk, ya? Terlambat?

680. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [56:42]

Ada, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:43]

Oh, suruh masuk itu, kalau ma ... sudah ada. Ini sendirian takut dia, padahal temannya banyak, ya, kalau takut itu.

682. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [56:54]

Siap.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:54]

Apalagi kalau sendirian di MK, sudah gelap. Oh, di sini lebih banyak hantunya daripada orangnya.

Mana? Katanya mau masuk? Enggak jadi masuk? Dibiarkan sendiri temannya?

Yasudah dilanjutkan dulu, dibaca, silakan.

684. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [57:33]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan temuan Nomor 003 dan seterusnya, tanggal 8 Desember 2024. (Bukti PK.37.8-1). Bahwa kabupaten ... bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 029 dan seterusnya, tanggal 9 Desember 2024. Yang pada pokoknya, pembetulan angka rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Gilubandu, Kabupaten Tolikara. (Bukti PK.37.8-2). Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, namun rekomendasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan temuan Nomor 004 dan seterusnya, tanggal 8 Desember 2024 (Bukti PK.37.8-3). Panwaslu Distrik Telenggeme meneruskan Rekomendasi Nomor 01 dan seterusnya tanggal 07 Desember 2024, dan Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 030 dan seterusnya, tanggal 9 Desember 2024. Yang pada pokoknya, pembetulan angka rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Telenggeme, Kabupaten Tolikara. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, namun rekomendasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kabu ... KPU Kabupaten Tolikara. (Bukti PK.37.84)

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran administrasi berdasarkan temuan Nomor 006 dan seterusnya, tanggal 15 Desember 2024 (Bukti PK.37.8-5). Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 037 dan seterusnya, pada tanggal 15 Desember 2024. Yang pada pokoknya, Rekapitulasi Ulang Perhitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Nunggawi. (Bukti PK.37.8-6). Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal Permohonan sengketa proses pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024.

Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Bupati dan Wali Kota.

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran prosedur administrasi berdasarkan formil ... Formulir Temuan Nomor 007 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2024 (Bukti PK.37.8-7).

Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 309 dan seterusnya, tanggal 16 Desember 2024, dan surat (...)

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:00]

Ya, itu penjelasannya semuanya sangat ... sangat normatif, jadi tidak malah ... tidak anu ... menjawab yang menjadi persoalan utama dari Perkara ini. Yang itu, dianggap dibacakan.

686. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:01:11]

Ya.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:11]

Sekarang itu tadi ... apakah betul, ya, noken dan one man one vote, betul?

688. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:01:21]

Betul.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:22]

Terus kemudian, pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara, ada yang mendekati ... apa ... batas waktu akhir, ada tid ... ada ketidaksepakatan 6 distrik?

690. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:01:37]

Ya.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:39]

6 distrik itu di dalam laporan KPU ini, mulai dari Distrik Aweku, Distrik Wugi, Distrik Airgaram, Distrik Kembu, Distrik Yuneri serta yang terakhir Distrik Nunggawi, betul?

692. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:01:56]

Betul, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:57]

Terus, diupayakan untuk ada kesepakatan, tapi tidak tercapai kesepakatan, betul?

694. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:02]

Benar, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:03]

Terus, habis itu gimana? Setelah tidak terjadi kesepakatan karena mepet waktunya harus selesai, akhirnya disepakati? Sepakat tidak sepakat atau bagaimana?

696. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:19]

Tidak terjadi kesepakatan hanya (...)

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:20]

Tidak terjadi kesepakatan.

698. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:21]

Ya.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:22]

Lha, karena batas waktu?

700. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:23]

Ya.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:24]

Karena batas waktu, terus gimana?

702. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:27]

Karena waktu itu kira-kira pukul berapa ... lewat batas waktu, akhirnya tidak terjadi kesepakatan.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:33]

Terus?

704. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:34]

Akhirnya, KPU menetapkan suara yang sudah ada.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:37]

Oke. Suara yang sudah ada yang ditetapkan itu sebagaimana yang disampaikan oleh KPU tadi?

706. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:43]

Benar, Yang Mulia.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Bahwa suara dari 6 distrik itu dianggap tidak sah?

708. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:02:48]

Benar, Yang Mulia.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:49]

Oke. Karena kalau itu ... suara itu ditambahkan, menurut KPU menjadi aneh karena melebihi DPT di Tolikara, ya? Ya, kan? Jadi kalau misalnya, Nomor Urut 1 itu memperoleh 41.432, ditambahkan 6 distrik 37.233 dan seterusnya. 4 Pasangan Calon itu kalau dijumlahkan menjadi suaranya terkumpul 279.482. Kalau sejumlah 270 ... 279.482 itu, maka ini melebihi DPT di Tolikara. DPT Tolikara berapa?

710. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:03:48]

DPT Tolikara ... izin, Yang Mulia, kita lihat catatan dulu.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:53]

Ya. Buka catatan, silakan. Enggak ujian kok ini, boleh.

712. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:03:56]

Ya.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:00]

Berapa DPT Tolikara?

714. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:04:01]

DPT Tolikara berjumlah 232.776.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:07]

Nah, ya. Makanya itu, kalau yang 6 distrik itu ditambahkan, maka DP ... suara sahnya menjadi 279.482. Kalau sejumlah itu, berarti melebihi DPT. Karena melebihi DPT, yang nyoblos tidak hanya orang. Babi, Kambing, ikut nyoblos kalau begitu, ya, kan? Oleh karena itu, menurut KPU, yang 6 ini tidak bisa ditambahkan supaya tidak melebihi DPT, gitu, ya, KPU, ya? Gitu.

716. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:04:45]

Izin, Yang Mulia.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:46]

He eh, gimana?

718. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:04:47]

Saya bisa bacakan hasil perolehan suara menurut Bawaslu.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:49]

Menurut Bawaslu?

720. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:04:49]

Ya.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:50]

Gimana, menurut Bawaslu?

722. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:04:52]

Ya, menurut pengawasan kami, Bawaslu. Hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pada 46 distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model D.Hasil.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:06]

Ya.

724. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:08]

Nomor Urut 1, Irinus Wanimbo, S.H.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:10]

Ya.

726. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:12]

Dan Arson R. Kogoya, S.Ip.,=41.000 (...)

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:13]

Ya, itu kok ... enggak usah disebut namanya saja.

728. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:16]

Nomor Urut 2 (...)

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Nomor 1 berapa tadi?

730. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:19]

41.432 suara.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:21]

Oke.

732. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:22]

Nomor 2=42.191 suara.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:27]

Oke.

734. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:28]

Nomor Urut 3=45.136 suara.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:32]

Oke.

736. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:33]

Nomor Urut 4=61.925 suara.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]

Ya.

738. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:38]

Total suara sah itu 190.684 suara.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:44]

Ya.

740. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:45]

Total suara tidak sah 42.000 ... 42.052 suara.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:52]

52.

742. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:05:53]

Total ... jumlah daftar pemilih tetap 232.736 suara.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:00]

Betul, sama dengan Termohon. Ya, kan sama dengan Termohon? Pihak Terkait juga menyetujui itu, Bawaslu juga menyetujui itu berarti,

ya, kan? Ya, enggak itu? Ha? Gimana tadi? Cuma tadi enggak ... yang enggak disampaikan (...)

744. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:06:22]

Sori, yang 6 distrik, Yang Mulia, dinyatakan hangus.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:25]

Ya, tidak sah.

746. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:06:26]

Ya, tidak sah.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:27]

Ya, kan? Hangus sama tidak sah, sama saja, kan?

748. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:06:30]

Ya.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:31]

Lah, ya. Betul, ya, berarti. Confirm, ya. Berarti sama antara Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya, berarti? Tapi istilahnya kalau di sini tidak sah, kalau Anda mengatakan, "Suara 6 distrik dianggap hangus," gitu? Ya, gimana?

750. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:06:54]

Karena tidak ada kesepakatan.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]

Lah, ya. Makanya itu dianggap ... kesepakatannya dianggap tidak sah. Kalau itu ditambahkan, jumlahnya melebihi DPT karena jumlahnya menjadi 279.482. Oleh karena itu, dinyatakan hangus, sehingga suaranya sebagaimana yang Anda bacakan juga itu. Tapi Anda menambahkan dari jumlah itu, ada 42.052 adalah suara tidak sah. Itu, toh, ya?

752. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:07:33]

Ya, itu suara sah keseluruhan, Yang Mulia.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:37]

Oh, itu suara keseluruhan (...)

754. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:07:38]

Ya, kalau yang 6 distrik itu 37.000 (...)

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:40]

232.736 itu suara total.

756. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:07:45]

Ya.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:46]

Yang 190 suara sah, yang tidak sah 42.052. Itu kan betul, gitu, kan?

758. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:07:54]

Itu secara keseluruhan. Kalau yang 6 distrik itu 37.000, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:59]

Ha? Gimana?

760. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:00]

Yang 42.052 itu suara sah keseluruhan, yang tidak, ini.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:07]

Lah, ya, se ... secara keseluruhan suara tidak sah=42.052?

762. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:13]

Ya.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:14]

Ya. Terus, apa lagi?

764. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:16]

Kalau yang 6 distrik itu 37.000.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:18]

Oh, itu jumlah (...)

766. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:19]

Ya.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:19]

Sendiri?

768. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:20]

Ya. Jumlahnya sendiri.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:20]

37.000?

770. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:22]

233 suara.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:23]

233, itu (...)

772. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:26]

Ya.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:26]

Yang hangus itu, toh?

774. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:28]

Ya (...)

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:28]

Oke.

776. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:28]

Yang hangus.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:29]

Berarti confirm sama. Ya, cukup, ya?

778. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:35]

Cukup, Yang Mulia (...)

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:35]

Itu berarti berlaku untuk perkara ... semua perkara ini, kan?
Berarti ada yang lain yang ... anu, enggak, kan?

780. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:43]

Tidak, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:43]

Ini sudah sama kan, berarti suaranya itu?

782. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:08:46]

Sama, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:46]

Ya, baik. Kita sudah selesai untuk perkara yang berhubungan dengan Kabupaten Tolikara. Bukti-buktinya mana?

784. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:04]

Izin, Yang Mulia.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:06]

Dari mana ini?

786. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:06]

Dari Pihak Termohon.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:08]

He eh, kenapa?

788. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:08]

297, 303, dan 306.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:11]

He eh, kenapa?

790. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:12]

Tadi bagian Petitum belum dibacakan, Yang Mulia.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:15]

Ya, sudah selesai kok belum dibacakan.

792. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:18]

Siap, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:18]

Petitumnya tadi sudah dibacakan, kan? Saya dikte, kan tanya, kan?

794. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:21]

Siap, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:21]

Ini suara yang sah, segini.

796. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:23]

Siap, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:23]

Ya, itu kan di Petitemnya itu, toh.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:25]

Siap, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:26]

Lah, ya. Mau apa lagi? Mau diubah? (...)

800. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:27]

Izin. Enggak, Yang Mulia. Tambahan dari dalil Termohon 2 ... 306, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:35]

Ya.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:35]

Mengenai tenggang waktu juga sama dengan Pihak Terkait. Bahwa tidak memenuhi tenggang waktu.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]

Ya, itu sama.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:41]

Siap, Yang Mulia.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:42]

Tadi sudah disebutkan sama, ya.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:44]

Yang terakhir dari dalil 297, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:48]

Ya.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:09:48]

Bahwa ada dalil kami di 297, Yang Mulia. Yang menyampaikan bahwa di Tahun 2012 ... ini sekadar refleksi, Yang Mulia. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara itu berlangsung dengan tidak damai, menelan korban jiwa. Di 2017 juga begitu, Yang Mulia.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:09]

Ya.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:09]

Karena di sana kan rawan ke rusuh, Yang Mulia.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:13]

Ya.

812. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:13]

Antarsuku, Yang Mulia. Terakhir di 2024, Yang Mulia. Kesyukuran kami di pemilihan kepala daerah kali ini, Yang Mulia. Pihak Termohon terkesan netral dan ti ... tidak menimbulkan korban jiwa, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:27]

Oke, ya.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:29]

Itu terakhir, Yang Mulia. Bukti kami di 297, di T-20, Yang Mulia. Terima kasih (...)

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:34]

Ini di antara yang ... anu, ini, itu petahana? Yang menang petahana?

816. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:40]

Bukan, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:41]

Petahananya nomor berapa? Enggak ada?

818. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:44]

Enggak ada, semua new comers, Yang Mulia.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:45]

Oke, new comers. Saya, enggak bisa Bahasa Inggris.

820. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:49]

Pendatang baru, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:49]

Nah.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:50]

Siap, Yang Mulia.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:51]

Diterjemahkan.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:10:52]

Siap, Yang Mulia.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:55]

Baik, sekarang sudah cukup, ya.

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:10:57]

Izin, Yang Mulia. Ter ... Pemohon 306.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:01]

Apa itu?

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:11:02]

Ingin menyampaikan terkait tenggang waktu. Prinsipal kami, mohon izin untuk menyampaikan tadi, menanggapi tenggang waktu.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:11]

Jadi Pemohon sudah selesai.

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:11:15]

Minta ... apa, menyampaikan terkait (...)

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:17]

Tenggang waktunya kenapa?

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:11:19]

Ya. Mohon izin, tadi kan menurut Termohon dan Pihak Terkait, bahwa Pemohon 306 melewati tenggang waktu. Nah, karena kenapa kami melewati tenggang waktu? Karena Termohon menetapkan penetapan ... Penetapan ini Nomor 349 Tahun 2024 itu pada pukul 23.55 WIT, Yang Mulia.

Nah, kami ingin menyampaikan saja. Bahwa kami ... apa ... membaca di salah satu artikel berita di Detik News, tepatnya. Bahwa MK pernah ... me ... menulis melalui Prof. Yang Mulia, Prof. Sadli Isra, bah ... bahwa MK meminta KPU perhatikan waktu penetapan kepala daerah, supaya harinya penuh. Nah, di sini Termohon menetapkan pukul 23.55 WIT.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:14]

Enggak, sekarang ... anu ... saja fakta hukumnya.

834. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:12:17]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:19]

Sebentar, sebentar.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:12:20]

Siap, Yang Mulia.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:21]

Ngomongnya satu-satu.
Fakta hukumnya saja.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:12:25]

Baik, Yang Mulia.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:25]

Ini, ya. Fakta hukumnya, Pemohon?

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:12:30]

Kami meng ... apa ... memasukkan Permohonan itu pada tanggal 19 Desem ... Desember 2024, pukul 01.10 WIB.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:41]

Oke. Ini Termohon menetapkan, mengumumkan Senin 16 Desember?

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:12:45]

Ya, pukul 23.55 WIT.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:46]

Pukul 23.55 WIT.

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:12:50]

Nah, sehingga kami beranggapan bahwa kami hanya mempunyai waktu yang full 2 hari (...)

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:53]

Ya, itu nanti kita menilai ... kita yang menilai.

846. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:12:56]

Baik, Yang Mulia.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:57]

Silakan, dia ngomong apa, kamu ngomong apa, tapi yang menilai kan kita.

848. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:00]

Baik.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:01]

Ya. Jadi ini fakta hukumnya, Termohon mengumumkan sekaligus menetapkan Senin, 16 Desember Tahun 2024 pada, pukul 23.55?

850. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:14]

Ya.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:14]

Ya. Kemudian, Pemohon mengajukan Permohonan, 19 Desember 2024, pukul 01?

852. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:22]

01.10 WIB.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:25]

Ya, itu fakta hukumnya kan?

854. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:26]

He em.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:27]

Ya, di ... dia ngomong itu lewat tenggang waktu kan, enggak ... enggak masalah.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:31]

Baik, Yang Mulia.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:32]

Silakan dia, ngomong gitu. Nanti, kita yang menilai kan?

858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:34]

Ya.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:35]

Ya, fakta hukumnya begitu, toh? Betul?

860. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:13:37]

Betul, Yang Mulia.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:38]

Ya. Sekarang Buktinya. Perkara 297 Buktinya Termohon T-1 sampai dengan T-20?

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI JAYA ADIPUTRA [01:13:50]

Siap, Yang Mulia.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:52]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-29?

**864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
297/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN GUSTAF LALEGIT
[01:13:57]**

Benar, Yang Mulia.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:58]

Kemudian, Bawaslunya PK.37.8-1 sampai dengan PK.37.8.124?

866. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:14:05]

Benar, Yang Mulia.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:06]

Baik. Ini untuk 297, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara 303. Termohon T-1 sampai dengan T-25?

868. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [01:14:21]

Benar, Yang Mulia.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:22]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-24?

**870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN
[01:14:25]**

Benar, Yang Mulia.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:26]

Kemudian, Bawaslu PK.37.8-1 sampai dengan PK.37.8-76?

872. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:14:34]

Benar, Yang Mulia.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:35]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang terakhir, untuk Perkara 306. Pemohon menambahkan bukti, betul?

874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:14:49]

Betul, Yang Mulia.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:50]

Perbaikan, ya? Tapi, itu perbaikan ... berupa perbaikan?

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:14:51]

Ya.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:53]

Yang dulu, yang saat ... anu ... tidak terbaca itu kan?

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:14:57]

Ya.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]

Baik. Itu P-5 sampai dengan P-10?

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD ZULKIFLI SYIFA [01:15:01]

Betul.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:01]

Baik, kalau begitu disahkan kembali. P ... P-1 sampai dengan P-22?

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [01:15:07]

Ya.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:08]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-15?

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [01:15:12]

Benar, Yang Mulia.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:13]

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-19?

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 306/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERTH E RUMBEKWAN [01:15:19]

Benar, Yang Mulia.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:20]

Bawaslu PK-2 ... 37.8-1 sampai dengan PK.37.8-23?

888. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:15:27]

Benar, Yang Mulia.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:28]

Seluruhnya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, sudah selesai untuk Tolikara, terima kasih.
Sekarang kita ... dari Tolikara ke Yahukimo jauh enggak?

890. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:16:10]

Jauh, Yang Mulia.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]

Jauh?

892. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:16:11]

Ya, pakai pesawat.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:12]

Pakai pesawat. Berapa jam ... jam itu? Siapa yang bisa jawab dari Tolikara ke Yahukimo?

894. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:16:19]

1 jam lebih.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:21]

1 jam lebih, naik pesawat?

896. BAWASLU: BUSIRI PAYOKWA [01:16:23]

Ya.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:24]

Oh, ya, kita kalau di sini cepat. Langsung dari Tolikara selesai, kita ke Yahukimo, ya, kan?

Baik. Termohon Yahukimo, silakan.

898. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:16:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:44]

Ya.

900. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:16:47]

Sebelum kami menyampaikan Pokok Jawaban dari Termohon. Perkenalkan saya, Stefanus Budiman, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Stefanus Budiman dan Rekan. Di samping saya, ada Bapak Abakuk Iksomon (Ketua KPU Kabupaten Yahukimo).

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:07]

Itu yang sebelumnya itu?

902. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:17:08]

Siap, Yang Mulia.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:09]

Pakai batik biru?

904. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:17:10]

Ya.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:11]

Nah, sudah masuk TV, saya lihat di sini.

906. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:17:16]

Baik. Untuk kepentingan presentasi, Yang Mulia, kami ada slide yang sudah diserahkan kepada tim tadi.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:25]

Silakan, ditayangkan.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:17:27]

Baik. Komisi Pemilia ... Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo. Slide pertama. Pokok Jawaban dalam Perkara Nomor 229 dan seterusnya.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:39]

Ya.

910. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:17:41]

Tentang kewenangan ... Kewenangan Mahkamah. Karena Pokok Permohonan tentang penyalahgunaan wewenang oleh calon petahana dan netralitas ASN, maka Termohon menganggap Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]

Ini di Eksepsi, ya?

912. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:04]

Ya, Yang Mulia, di Eksepsi.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:05]

Tidak ada kewenangan.

914. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:06]

Ya. Di Eksepsi poin kedua adalah Kedudukan Hukum.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:09]

Ya.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:10]

Bahwa Pemohon, betul, adalah Paslon Nomor Urut 2.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:15]

Ya.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:16]

Kami beritahukan bahwa di dalam pemilihan umum ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, hanya terdiri dari dua pasangan calon.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:26]

Ya.

920. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:27]

Terkait Pasal 158, perolehan suaranya adalah Paslon 1=184.575, sedangkan Paslon Nomor 2 sebagai Pemohon=141.635.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:48]

Ya.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:18:46]

Nah, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 42.940 suara atau konversi 13,16%.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:10]

13,16%.

924. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:11]

Ya.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:02]

Mestinya hanya berapa?

926. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:14]

Kabupaten Yahukimo ini masuk dalam kategori 2, yaitu 1,5%, Yang Mulia, 1,5%.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:19]

1,5%. Jadi, melebihi ambang batas.

928. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:22]

Jauh di atas itu.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:23]

Jauh, ya?

930. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:23]

Ya.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:24]

Baik. Terus?

932. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:26]

Kemudian, terkait Legal Standing ini. Pemohon ... Termohon menyadari bahwa ada beberapa Putusan MK yang menunda penerapan ambang batas, ya.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]

Menunda berlakunya ... oke.

934. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:41]

Itu karena memang ditemukan dalam putusan-putusan tersebut, terdapat dalil-dalil memang yang cukup kuat dalam Permohonan Pemohon.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:52]

Oke.

936. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:19:52]

Nah, dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, kami menilai tidak cukup kuat untuk menunda pemberlakuan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:06]

Oke.

938. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:20:07]

Kemudian di Eksepsi tentang Permohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa Pemohon pada pokoknya menyamp ... mempersoalkan perolehan suara di 10 distrik. Nah, perolehan suara di 10 distrik ini ternyata ketika diakumulasikan dengan 5 ... 41 distrik yang

tidak dipersoalkan oleh Pemohon, maka jumlah atau perhitungan versi Pemohon dalam Permohonannya perhitungannya salah.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

Oke.

940. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:20:45]

Itu poinnya (...)

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:45]

Ini di sana, berlaku noken semua, ya?

942. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:20:48]

Ya, nanti penjelasan noken kami di bagian Pokok Perkara, Yang Mulia.

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:51]

Ya.

944. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:20:52]

Ya.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:52]

Nanti. Tapi yang saya tanya dulu (...)

946. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:20:54]

Ya.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:54]

Ini noken semua, ya?

948. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:20:55]

Di Kabupaten Yahukimo, berdasarkan Putusan MK kemudian, pra ... Keputusan KPU RI dan Keputusan KPU Papua Pegunungan. Untuk

Kabupaten Yahukimo, hanya Distrik Dekai yang menggunakan sistem nasional, selebihnya 50 distrik lainnya (...)

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:13]

Oke.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:13]

Menggunakan (...)

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:14]

Itu.

952. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:14]

Sistem noken.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:15]

Di ... anu ... ya, di Ibu Kota?

954. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:16]

Ibu Kota, Yang Mulia.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:17]

Oke.

956. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:19]

Selanjutnya, untuk (...)

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

Berarti ada (...)

958. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:23]

Eksepsi berikutnya (...)

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:24]

Sebentar. Ada 46 distrik?

960. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:28]

51, Yang Mulia.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:28]

51 distrik, hanya 1 distrik yang one man one vote?

962. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:32]

Ya, hanya 1 distrik.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:33]

Oke.

964. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:34]

Distrik di Ibu Kota (...)

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:35]

Ibu Kota.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:35]

Distrik Dekai.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:36]

Oke, terus.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:37]

Kemudian Eksepsi berikutnya adalah ada kesalahan pada Petitum Pemohon.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:44]

Oke.

970. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:21:45]

Ya. Kesalahan ini dikarenakan penjumlahan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon, itu juga yang dimintakan dalam Petitumnya. Akumulasi perhitungannya di pe ... di permo ... di Petitumnya salah, di Positanya juga salah.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:04]

Ya.

972. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:22:05]

Kemudian Eksepsi yang berikut, Yang Mulia.
Pemohon salah menerapkan ambang batas. Dalam Permohonannya Pemohon menggunakan ambang batas 2%, padahal Kabupaten Yahukimo masuk kategori 1,5% karena (...)

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:22]

Jumlah penduduknya.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:22:22]

Jumlah penduduknya diatas 250 ribu.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:25]

Oke.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:22:26]

Itu, Yang Mua ... Yang Mulia dalam Eksepsi.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:28]

Ya.

978. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:22:29]

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan.
Bahwa pokok dalil Pemohon ini adalah mempersoalkan perolehan suara di 10 distrik. Dimana perolehan suara menurut Pemohon di 10 distrik itu, sebagaimana kami uraikan satu per satu di 10 distrik ini. Kami nyatakan bahwa perolehan suara menurut Pemohon tersebut adalah

tidak benar. Kami uraikan satu persatu perolehan suara 10 distrik yang dipersoalkan itu yaitu Distrik Silimo jumlahnya sebagaimana dalam tabel. Kemudian Distrik Amuma, Distrik Puldama, semuanya diakumulasi di dalam tabel. Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, Distrik Nipsan. Itu semua hasilnya kami sampaikan dalam jawaban kami, dalam table. Itu sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:37]

Oke.

980. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:23:40]

Selanjutnya, apabila diakumulasikan perolehan 10 distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon, dengan 41 distrik yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon, maka perolehan suara yang benar adalah Paslon Nomor 1=184.575. Sedangkan Paslon Nomor 2 (Pemohon)=141.635.
Jumlah suara 326.210.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:14]

Ya.

982. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:24:16]

Terkait dalil lain yang mengatakan bahwa Termohon mengubah suara di 10 distrik tersebut, kami nyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar (...)

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:29]

Seandainya itu tadi, seandainya 10 distrik itu diberikan untuk Pasangan Calon Pemohon, itu masih tetap selisihnya tetap dimenangkan oleh Pihak Terkait, berarti itu kesimpulannya?

984. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:24:41]

Berubah, Yang Mulia.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:42]

Berubah?

986. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:24:43]

Berubah.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:44]

Oke.

988. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:24:44]

Ya.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:45]

Jadi, harus kita teliti itu, ya.

990. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:24:48]

Benar.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:49]

Ya. Terus, silakan.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:24:50]

Ya. Terkait dalil lain yang mengatakan bahwa terjadi perubahan suara atas 10 distrik itu, yang dilakukan oleh Termohon di tingkat ... rekapitulasi tingkat Kabupaten di Dekai, kami nyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar.

Karena sesungguhnya, pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten, itu dilakukan secara terbuka (transparan). Panitia pemilihan distrik masing-masing membacakan hasil yang diperoleh di tingkat distrik, melalui sistem noken di tingkat distrik dan di tingkat TPS. Itu yang dibacakan oleh panitia pemilihan distrik, disaksikan oleh panitia pen ... pan ... Panwas distrik, kemudian pasangan calon, beserta saksinya masing-masing. Itu dilakukan secara terbuka.

Kemudian ada hal yang kebijakannya memang yang diambil oleh Termohon untuk mencegah terjadinya pengurangan, penambahan, pengalihan dan seterusnya. Pemohon ... Termohon melakukan rapat di tanggal 16 November dengan stakeholder, ada kepolisian, ada pe ... Pemda, Pejabat Bupati, ada Dukcapil, ada Gakkumdu, Bawaslu. Yang pada intinya mengatakan bahwa, dalam rangka menghindari terjadinya peralihan, pengalihan, perubahan dan seterusnya, maka disepakati di

Halaman Kantor KPU Kabupaten Yahukimo itu dilaksanakan rekapitulasi dan dibuat papan tabulasi,

1. Untuk perolehan suara Gubernur.
2. Untuk perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati.

Setiap PPD yang masuk kabu ... ke ibu kota untuk melaksanakan rekap kabupaten, maka langsung dijemput dari Bandara Dekai, langsung dibawa ke tempat rekapitulasi terbuka itu, dan disitu langsung dibacakan. Betul-betul diadakan secara steril dan tidak ada ruang bagi PPD atau siapapun untuk mengubah suara tersebut.

Itu yang dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:58]

Oke.

994. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:26:59]

Kemudian dalil lain, tentang logistik.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:03]

Ya.

996. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:04]

Pemohon mengatakan bahwa, "Tidak mengirimkan logistik." Kami sampaikan bahwa logistik Pilkada untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo telah terdistribusi, dokumentasinya semua ada, kami buktikan untuk 51 distrik.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:20]

Ya.

998. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:21]

Kemudian, terkait dengan ada tuduhan, ada keterlibatan ASN karena Sekretariat PPD (...)

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:31]

Ini ada yang ... anu ... yang petahana, ada?

1000. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:35]

Ada, Yang Mulia.

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:36]

Petahana, itu?

1002. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:37]

Ya.

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:37]

Pasangan nomor berapa?

1004. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:38]

Pasangan Nomor 1, Yang Mulia.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:39]

1 itu, petahana?

1006. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:41]

Ya, Yang Mulia.

1007. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:42]

Oke.

1008. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:27:43]

Nah, terkait dengan tuduhan bahwa adanya pemanfaatan ASN, keterlibatan, karena perangkat Sekretariat PPD itu dipilih atau adalah ASN. Kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan, memang yang mengisi jabatan sekretariat adalah ASN.

Nah, dalam proses pengisian jabatan sekretariat, mulai dari sekretaris PPD sampai dengan tenaga kesekretariatan, KPU Kabupaten Yahukimo mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 24 Mei. Yang pada pokoknya, mohon bantuan tenaga kesekretariatan untuk Panitia Pemilihan Distrik.

Atas surat tersebut, Pemerintah Daerah melalui Bupati mengeluarkan Surat Nomor 182 Tahun 2024, Surat Keputusan Tentang

Pengangkatan ASN Untuk Jabatan Sekretariat Distrik, di 51 distrik, di Kabupaten Yahukimo.

1009. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:48]

Oke.

1010. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:28:48]

Semua Termohon laksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1011. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]

Pada waktu rekrutmen anu ... ya? Petugas-petugas, ya?

1012. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:28:58]

Ya, Yang Mulia.

1013. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:59]

Ya.

1014. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:28:59]

Tugas sekretariatnya (...)

1015. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:00]

Ya.

1016. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:29:01]

Bukan. (...)

1017. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:01]

Sekretariat?

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:29:02]

Ya, sekretariat PPD-nya.

1019. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]

Karena sekretariat itu harus mengurus semua anu ... yang berhubungan dengan pertanggungjawaban ASN, toh, sehingga orang ASN ini. Gitu?

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:29:12]

Regulasinya begitu, Yang Mulia.

1021. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:13]

Ya.

1022. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:29:13]

Ketentuannya diminta untuk ... dari ASN.

1023. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:17]

Ya.

1024. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:29:17]

Sekretariatnya.

Kemudian, Yang Mulia. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon soal angka-angka di 10 distrik ini, kami sampaikan bahwa, sungguh Termohon terkejut karena angka-angka ini, berdasarkan hasil wawancara kami dengan ... dan temuan fakta lapangan, angka-angka ini ternyata baru muncul di Permohonan di MK ini. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, angka-angka ini tidak pernah disampaikan, sehingga ada proses persandingan di sana.

1025. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:51]

Oke.

1026. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:29:51]

Kami juga melihat bahwa berdasarkan inzage, begitu banyak surat pernyataan-pernyataan diajukan sebagai bukti, kami sampaikan bahwa, kami tidak ... sama sekali dalam proses rekapitulasi, baik di kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diketahui oleh Termohon.

1027. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:11]

Ya. Petitem sekarang?

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:30:12]

Ya demikian, Yang Mulia.

Kami ... Petitem, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi,
Mengabulkan Eksepsi Termohon.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 662 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024, tanggal 6 Desember, pukul 10.57 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut, Nama Pasangan Calon,
Paslon 1 perolehan suara=184.575 suara.
Pasangan Calon Nomor Urut 2=141.635.
Total suara 326.210.

1029. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:23]

DPT-nya berapa sana?

1030. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:31:28]

DPT-nya 3 ... 32.610. 320 ... 326.211, Yang Mulia.

1031. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:36]

211?

1032. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:31:38]

Ya.

1033. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:39]

Karena pakai noken ini, jadi anu ... ya. Hampir 100%?

1034. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:31:43]

Hampir 100%, Yang Mulia.

1035. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:44]

Oke, ya?

1036. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:31:48]

Ya.

Demikian, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum, ditandatangani.

1037. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:58]

Baik, terima kasih. Ini Pak Stefanus, ya?

1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 229: STEFANUS BUDIMAN [01:32:01]

Siap, Yang Mulia.

1039. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:02]

Oke. Sekarang Pihak Terkait, Yahukimo.

1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:32:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, saya atas nama Habel Rumbiak dan Rekan saya, Ivan Kairupan. Akan menyampaikan keterangan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

1041. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:22]

Ya. Untuk Eksepsi, Anda sama dengan Pihak Termohon?

1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:32:27]

Tidak sama, ada (...)

1043. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:28]

Yang beda di mana?

1044. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:32:29]

Yang beda di tenggang waktu.

1045. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:31]

Oke, tenggang waktunya gimana?

1046. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:32:34]

Tenggang waktu, menurut Pemo ... menurut Pihak Terkait, Pemohon telah mengajukan Permohonan melalui ... melebihi waktu 3 hari kerja. Karena, Penetapan Pihak Termohon tanggal 6 Desember 2024 pukul 10.57. Sedangkan, pengajuan Permohonan 10 Desember pukul 21.38 telah melewati pukul 08.57 WIB atau Waktu Indonesia ... Indonesia Timur 10.57.

1047. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:06]

Melampaui tenggang waktu berarti?

1048. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:33:09]

Menurut ... menurut Pihak Terkait demikian.

1049. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:1]

Oke.

1050. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:33:12]

Kemudian, Eksepsi yang berikut.

Berkenaan dengan kedudukan Pemohon. Menurut Pemohon ... menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat karena telah melewati amang batas 158 ayat (1) dari (...)

1051. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:24]

Sama, ya? Kalau ini.

1052. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:33:09]

Undang-undang. Karena, menurut Pemohon. Ya, sama dengan Pihak Termohon tadi.

1053. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:32]

Ya.

1054. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:33:32]

Menurut pihak ... Pihak Terkait perbedaannya adalah 4.893 suara, seharusnya.

1055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:41]

Ya.

1056. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:33:41]

Tetapi, yang terjadi adalah 42 ... 42.940.
Oleh karena itu, telah melewati ambang batas. Maka menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak punya Legal Standing.

1057. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:52]

Ya.

1058. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:33:53]

Kemudian, berkenaan dengan Permohonan Pemohon. Menurut Pihak Terkait, masih ada 1 lagi berkenaan dengan (...)

1059. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:00]

Ya.

1060. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:34:00]

Permohonan tidak jelas. Yaitu dalam Petitum dengan Posita bertentangan.

Dalam Petitum angka 4, Pemohon mencantumkan Permohonannya agar Mahkamah menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 662 sekian-sekian, 6 Desember tanpa tahun. Nah, penetapan perolehan hasil, sedangkan obyek Permohonan berbeda judulnya dengan apa yang disampaikan dalam Petitum Pemohon. Itu bisa dilihat dari Pokok Permohonan, dimana dalam Perihal Permohonannya Pemohon berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Petitum angka 3 atau 4. Itu mengenai Eksepsi.

Berkenaan dengan Pokok Permohonan, dari 10 distrik yang disampaikan oleh Pemohon. Pemohon dalam hal ini hanya memindahkan perolehan hasil masing-masing dari 10 distrik tadi, dimana perolehan masing-masing Pemohon dan Pihak Terkait. Kemudian Pemohon memindahkan seluruh hasil itu menjadi perolehan dari Pihak Pemohon. Jadi, polanya demikian untuk 10 distrik. Tetapi sesungguhnya, tidak demikian. Apa yang disampaikan oleh Pemohon sebelumnya dalam tabel pertama itulah hasil yang benar, sesuai dengan apa yang diperoleh oleh masing-masing calon.

Misalnya saja dalam contoh Bukti P-1 yang kami ajukan. Untuk Distrik Amuma, di sana ada perolehan suara masing-masing calon, sebagai contoh saja pola yang dilakukan oleh Pemohon. Di sana masing-masing calon memperoleh, Pihak Terkait=3.483. Kemudian Pemohon=9.381. justru Pemohon lebih banyak suaranya. Total suaranya adalah 12.864.

Nah. Tetapi, dalam Permohonan Pemohon. Pemohon mencantumkan seluruh jumlah suara milik Pasangan Nomor 1 dan Pasangan Nomor Urut 2 menjadi ... seluruhnya menjadi milik Pasangan Nomor Urut 2. Itu pola yang digunakan oleh Pemohon dalam menyusun Permohonannya untuk 10 distrik. Dan untuk pembuktiannya, Pihak Terkait telah mengajukan PT-1 sampai dengan PT-11.

1061. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:35]

(suara tidak terdengar jelas). 1 sampai PT-11?

1062. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:36:37]

Ya.

1063. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:38]

Ya.

1064. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:36:39]

PT-1 sampai PT-11.

1065. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:41]

Yang ... anu ... ya, bukti untuk yang 10 distrik itu, ya?

1066. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:36:44]

Betul, Yang Mulia. Pihak Terkait telah menyusunnya sedemikian rupa secara kronologis, baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video untuk masing-masing distrik.

1067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:53]

Ya.

1068. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:36:54]

Untuk memperkuat perolehan hasil dari masing-masing calon, yang sebenarnya di tingkat PPD. Ini untuk membuktikan bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon adalah hanya memutarbalikkan hasil atau hanya memindahkan hasil keseluruhan tadi.

1069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:10]

Ya, enggak usah di (...)

1070. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:37:11]

Demikian, Yang Mulia.

1071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:12]

Petitum, sekarang.

1072. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:37:13]

Ya.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah atau kepada, Yang Mulia, agar menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Berkenaan dengan Pokok Perkara.

Menyatakan sah Keputusan dari Pihak Termohon. Dan Dalam Eksepsi, kami mohon agar mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1073. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:33]

Baik, terima kasih. Kemudian ... sekarang Bawaslu Yahukimo, silakan. Ada resumennya?

1074. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:37:45]

Ada.

1075. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:45]

Berapa halaman, Yahukimo?

1076. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:37:47]

3.

1077. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:48]

3 halaman, ya.

1078. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:37:48]

Ya.

1079. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:49]

Dibaca seluruhnya?

1080. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:37:51]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami Bawaslu Kabupaten Yahukimo, saya sendiri Yusem Bahabol (Ketua Bawaslu) dan rekan saya, Somun Kobak (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa).

Keterangan Bawaslu Kabupaten Yahukimo terhadap Perkara 229/PHP dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 2. Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan keterangan seperti berikut.

Bahwa Pemohon terkait selisih perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon pada Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melakukan upaya pencegahan dengan imbauan, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan tugas pengawasan melekat pada saat proses rekapitulasi perolehan suara hasil tingkat Kabupaten Yahukimo, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bawaslu ... bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Hasil Suara Pleno Tingkat Kabupaten pada tanggal 29 November 2024, di Halaman Kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Dan pada saat rekapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan kabupaten.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan pengawasan melekat pada saat Rekapitulasi Hasil Suara Pleno Tingkat Kabupaten pada tanggal 30 November 2024. Dan pada saat rekapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan kabupaten.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan tugas pengawasan melekat pada saat rekapitulasi hasil suara Pleno tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024 dan pada saat rekapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo melaksanakan pengawasan melekat rekapitulasi hasil suara Pleno tingkat Kabupaten pada tanggal 3 Desember 2024 dan pada saat rekapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara tingkat distrik dan pada saat rekapan kabupaten.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo memelaksanakan pengawasan melekat Rekapitulasi Hasil Suara Pleno Tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 dan pada saat rekapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo tidak menemukan adanya perbedaan suara di tingkat distrik dan pada saat rekapan Kabupaten.

Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada tanggal 6 Desember 2024, terkait pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Yahukimo, sebagai berikut dianggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan perubahan dan pengalihan suara yang dilakukan Termohon ... pada rekapitulasi

perolehan suara di dis ... di Kabupaten Yahukimo yang terdapat di Distrik Silimo, Distrik Amuma, Distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan yang dilakukan oleh pengawas distrik pada Distrik Silimo, Distrik Amuma, distrik Puldama, Distrik Suntamon, Distrik Langda, Distrik Wusama, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Dirwemna, dan Distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo, sebagai mana termuat dalam tabel hasil pengawasan untuk perolehan suara pasangan calon sebagai berikut dianggap dibacakan.

3. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan, namun tidak diterima dan tidak dilakukan pembetulan, sehingga saksi Pemohon menyampaikan keberatan melalui D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi-KWK dan telah diadakan ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada tanggal 6 Desember 2004, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Yahukimo melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Saksi dari Pasangan 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Oleh karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 belum mendapatkan D.Hasil-KWK distrik, pada 51 distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo.

Bahwa Bawaslu Yahukimo telah menerima pelimpahan Laporan Nomor 009/LP dan seterusnya dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melalui surat Nomor 92/PP dan seterusnya, perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 an. Yosua Heluka dari Calon Nomor Urut 02. Yang pada pokoknya terkait KPU Kabupaten Yahukimo tidak melakukan distribusi logistik. Sesuai prosedur dan melakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak menggunakan D.Hasil. Setiap distrik yang merupakan hasil kesepakatan Masyarakat, tetapi menggunakan data manual yang ada di papan tabulasi, di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo mengeluarkan pemberitahuan ... pemberitahuan status laporan pada tanggal 15 Desember, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti, sehingga laporan dihentikan penanganannya karena terlapor tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran.

4. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan pene ... penetapan PPD, KPPS, serta PPD, dimana Sekretaris PPD di 51 Distrik, Kepala Distrik ditetapkan sebagai PPD. Adanya keterlibatan Oknum Aparatur Sipil Negara. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo, memperoleh salin ... Surat Salinan Keputusan Bupati Nomor 182 Tahun 2024, tanggal 27 Mei tentang Penunjukan Pengangkatan Sekretaris dan Anggota Sekretaris

Panitia Distrik se-Kabupaten Yahukimo, pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo, telah melaksanakan tugas pencegahan dengan imbauan dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dalil Pemohon, adanya keterlibatan langsung Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, tidak mendapat laporan atau temuan yang berkaitan dengan hal tersebut.

5. Bahwa dalil Pemohon terkait dugaan Termohon, mereka menggunakan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong, terjadi perubahan hasil perolehan suara Pemohon di 10 Distrik. Karena Termohon melakukan perhitungan tidak berbasis C.Hasil dan D.Hasil dan mendistribusikan logistik di 51 di ... tidak disertakan Model C.Hasil dan Model D.Hasil di tingkat PPD dan KPU.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah melaksanakan pengawasan pada saat pentribusian logistik pada tanggal 22 sampai dengan 26 November 2024, dengan rute sebagai berikut.

Bahwa pengiriman logistik rute 1, yaitu Distrik Dekai Ke Wamena melalui pesawat Tirigana, lalu dilanjutkan ke Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Uka, Distrik Yogosem, dan Disrik Mugi.

Bahwa pengiriman logistik pada rute ke-2 yaitu Distrik Dekai ke-43 distrik menggunakan pesawat barbaran kecil Advent Doyo dengan rincian pengiriman 3 orang PPD, 1 orang pengawas, dan logistik.

Berikut bahwa pengiriman logistik pada rute ke-3 dari Distrik Dekai ke ... Distrik Dekai Kota, Distrik Seralada menggunakan mobil roda 4.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Yahukimo telah memastikan pengiriman logistik sudah terkirim ke setiap Disrik pada 51 Distrik di Kabupaten Yahukimo. Bahwa dalil Pemohon terkait Termohon merekap menggunakan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Yahukimo mendapat informasi terkait penggunaan kertas kosong yang digunakan oleh PPD, untuk rekapitulasi ditingkat distrik. Oleh karena berdasarkan sistem noken melalui kesepakatan masyarakat pada setiap TPS, kemudian disampaikan ke ... kep ... kepada PPD untuk dilakukan rekapitulasi perolehan hasil suara yang dituangkan ke dalam papan tabulasi manual dengan menggunakan lembar kertas kosong.

Selain hal tersebut, kondisi jaringan internet di 51 distrik se-Kabupaten Yahukimo tidak mendukung. Sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas kosong dan dibawa ke tingkat kab ... kabupaten ... KPU Kabupaten, untuk dilakukan rekapitulasi dan dituangkan ke D.Hasil distrik untuk dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Sirekap.

Sekian, Yang Mulia.

1081. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:43]

Ya, terima kasih. Prof Enny ada? Silakan Prof.

1082. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:47:48]

Ya. Ini kalau dibuka, ya. Nanti tolong dicek, ya. Di halaman 19 ...
 19 Termohon khusus Distrik Tangma, Buktinya T-13, ya? Tolong dicek.
 Di Bawaslu, di tabel 7, halaman 9, tolong dicek juga, ya, Bawaslu.
 Itu khusus yang Tangma itu ada perbedaan, ya? Selisih suaranya
 di sini, Paslon 1 sama=2.531. Tapi, Paslon 2-nya itu yang benar yang
 mana? 2.576 atau 2.817? Coba yang dari Termohon, yang betul yang
 mana? Di halaman 19, kalau buktinya mengajukan T-13, tapi yang benar
 yang mana itu? Khusus Paslon Nomor 2.

1083. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:48:55]

Izin, Yang Mulia.

1084. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:48:56]

Sudah ketemu?

1085. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:48:56]

Dari Termohon, berdasarkan Bukti T-13=2.576.

1086. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:01]

2.576?

1087. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:49:03]

Ya.

1088. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:03]

T-13 nya. T-13 itu, bukti apa? D.Hasil?

1089. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:49:05]

D.Hasil, Yang Mulia, D.Hasil.

1090. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:07]

D.Hasil?

1091. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [01:49:07]

Ya.

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:07]

D.Hasil. Kalau dari Bawaslu buktinya apa ini? Di tabel 7, halaman 9 ... halaman 9. Itu buktinya, apa itu, Pak? Bukan yang ringkasan lho, Pak, yang sudah diserahkan ke Mahkamah. Ditulis di sini 2.817, betul enggak, itu?

1093. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:49:40]

Yang Mulia, tadi kita bawa ringkasan dengan alat bukti saja.

1094. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:45]

Oh, ringkasan dengan alat buktinya.

1095. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:49:48]

Ya.

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:48]

Yang aslinya ndak ke bawa?

1097. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:49:49]

Ya. Ya, Yang Mulia.

1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:49:51]

Ya. Bukti ... bukti terkait dengan tabel-tabel ini ada di bukti apa, Pak? PK berapa, Pak? Buktinya?

1099. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:04]

Ini Anda baca ... anu ... bawa Bukti PK.37.11 sampai dengan PK.37.7-12? Ada 12 bukti itu berarti?

1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:34]

Itu yang dibuka apa itu, Pak?

1101. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:50:36]

Ini yang tadi (...)

1102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:36]

Yang Bapak, buka-buka itu?

1103. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:50:37]

Yang Mulia, ini yang alat bukti.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:40]

Ya.

1105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:40]

Oh, yang tadi alat bukti?

1106. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:50:41]

Alat bukti dengan yang kami bawa resume. Kalau untuk yang ini kami tidak bawa, Yang Mulia.

1107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:47]

Itu yang dicari-cari, Bapak itu, apa itu?

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:49]

Bukti?

1109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:50:49]

Untuk bukti tabel ... bukti tabel T-7, tabel T-7, ya? Desa ... Distrik Tangma, ada perbedaan. Yang lainnya sudah sama, hanya itu saja. Sudah ketemu, Pak?

1110. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:51:35]

Sab ... sabar, Yang Mulia.

1111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:37]

Waduh.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:43]

Hakimnya disuruh sabar. Karena Bawaslunya, badannya gede kita takut ini, jadi sabar ini kita.

1113. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:15]

Yang ... Yang Mulia, untuk Angka.

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]

Ya.

1115. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:17]

Yang Angka, ya?

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:18]

Ya, sebelahnya.

1117. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:19]

Oke. Yang Distrik Tangma (...)

1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:23]

Tangma.

1119. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:23]

(ucapan tidak terdengar jelas).

1120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:24]

Distrik Tangma.

1121. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:25]

Ya, atau ... atau Termohon 2.531 (...)

1122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:31]

Ya.

1123. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:31]

Pemohon 2.817.

1124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:35]

2.817?

1125. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:37]

Ya. Ya, Yang Mulia.

1126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:40]

Termohon? Ini di (...)

1127. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:42]

Pe ... Pe ... Pemo ... Pemohon ... Pemohon 2.817.

1128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:48]

Ya.

1129. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:49]

Termohon 2.531.

1130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:54]

Itu datanya ... buktinya Bawaslu, ya?

1131. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:52:57]

Ya, Yang Mulia.

1132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:58]

Itu ada ... ada bukti yang diajukan ke Mahkamah. Ya, ini kalau Bawaslu ngajukan bukti di sini 2.531, ya, untuk Paslon Nomor 1. Paslon Nomor 2-nya=2.576, Pak, yang diajukan ke sini. Ini Bapak salah nulis jangan-jangan? Ini hasil laporan pengawasan Bawaslu, loh, ini. 25 ... yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Yagunat Matuan. Jadi, sama dengan Termohon kalau yang ini hasilnya ini. Yang Bapak sebutkan tadi dan maksudnya yang ditulis ini yang tidak sama, gitu. Oke, itu, Pak, ya. Ini buktinya ada nih dari Termo ... dari Bawaslu sudah ada nih.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:09]

Ini sebetulnya (...)

1134. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:54:10]

Ya ... ya (...)

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:10]

Ada yang data di sini itu anu ... suaranya sudah sama dengan punyanya Termohon. Kalau itu yang ditulis, kok anu ... beda. Atau salah ketik, typo, apa gimana itu? Untuk (...)

1136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:32]

Jadi, saya ulangi lagi, Pak, ya.

1137. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:54:32]

Ya, maaf (...)

1138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:33]

Jadi, Buktinya Termohon T-13 dengan bukti Bawaslunya sama, Pak, ya. Hanya yang Bapak buat dalam (...)

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Yang ditulis (...)

1140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:45]

Ininya ... laporan Bawaslunya (...)

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:46]

Ditulis dalam laporan.

1142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:47]

Yang ini Keterangan Bawaslu yang dibawa ke MK ini, yang tadi sudah dibacakan, saya cocokkan, khusus yang Tangma itu yang berbeda, gitu, loh, Pak.

1143. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:54:58]

Baik, Yang Mulia. Ini yang saya pakai catatan dari ... sudah lama punya, ini yang ketikannya benar sekali sesuai dengan ... cocok dengan itu. Jadi, Pemohon ... maaf, Termohon=2.531.

1144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:22]

Ya.

1145. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:55:22]

Pemohon=2.576.

1146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:25]

Oh, gitu?

1147. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:55:26]

Ya.

1148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:27]

Begitu, ya?

Kemudian, ini kan tadi dijelaskan bahwa Pemohon tidak tanda tangan, ya, di ... pada waktu rekap di kabupaten karena D.Hasil-KWK nya belum diserahkan?

1149. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:55:40]

Ya, benar, Yang Mulia.

1150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:55:41]

Kenapa itu, Pak, belum diserahkan?

1151. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:55:43]

Itu menurut ... memang untuk 51 distrik dalam pengawasan Pandis Distrik, PPD saksi Pemohon dan Termohon untuk 51 di sini sudah tanda tangan dan sudah menerima hasil di lapangan. Setelah itu mereka sudah bawa sampai di tingkat KPU Kabupaten Yahukimo dan KPU Kabupaten Yahukimo melaksanakan rekapitulasi di halaman kantor KPU, bukan di dalam KPU, dalam ruangan tidak. Jadi semua hasil sudah dilihat oleh semua orang dan sudah disepakati, sudah dalam pengawasan Panwas Distrik, 51 distrik. Bahwa di Kabupaten Yahukimo, di kantor KPU SETELAH itu sudah menerima hasil di sana. Tetapi karena mungkin D.Hasil yang tidak mengisi dan kami sudah membacakan tadi alasan, setelah ... karena sistem noken di Kabupaten Yahukimo untuk 50 distrik (...)

1152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:51]

51, ya?

1153. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:56:52]

Ya, 51 distrik sistem noken, sehingga PPD dan Pandis turun di lapangan. Kemudian rakyat memberikan hak suaranya melalui papan tabulasi dan itu sistem noken, sistem ikat, sehingga di sana tidak bisa untuk apa namanya (...)

1154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:13]

Tapi D.Hasilnya sudah di (...)

1155. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:57:14]

Akses internet yang ... akses internet yang tidak bisa, sehingga mereka (...)

1156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:17]

Sebentar, sabar (...)

1157. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:57:18]

Mengawal dengan ... mengawal hasil itu bawa di KPU.

1158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:21]

Ya.

1159. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:57:22]

Dan direkap kemudian nanti akan disesuaikan.

1160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:25]

Jadi mereka sebetulnya semua saksi sudah bawa D ... D. Hasil di setiap distriknya itu?

1161. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:57:30]

Sangat benar, Yang Mulia.

1162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:31]

Sudah semua, ya?

1163. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:57:32]

Ya.

1164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:57:32]

Oke, terimakasih.

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:33]

Ya, sekarang terakhir saya. Sama enggak perolehan suara akhir yang suara yang benar? Kalau menurut Bawaslu, Pasangan Nomor 1, berapa? Ini totalnya sekarang.

1166. BAWASLU: YUSEM BAHABOL [01:57:48]

Nanti teman yang (...)

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:51]

Silakan. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara berapa?

1168. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:57:57]

Baik. Izin, Yang Mulia.

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:58]

Ya.

1170. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:57:59]

Perolehan Suara Pasangan 01=184, mohon maaf. Ulang, Yang Mulia. 1=84.575 (...)

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:22]

Suara.

1172. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:58:22]

Suara. Paslon (..)

1173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:24]

Nomor Urut 2?

1174. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:58:27]

02=141.635.

1175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:33]

Ya, sama dengan ... anu ... ini, punyanya Termohon.

1176. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:58:36]

Ya, Yang Mulia.

1177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:37]

Total suara sah?

1178. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:58:38]

Tot ... total suara=326.210.

1179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:44]

Oke, baik. Antara Termohon dan Bawaslu sama?

1180. BAWASLU: SOMUN KOBAK [01:58:50]

Ya, Yang Mulia.

1181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:51]

Ya, baik. Sebelum saya akhiri, saya ngesahkan (...)

1182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:58:54]

Izin, Yang Mulia.

1183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:55]

Bukti dulu.
Dari mana?

1184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:58:57]

Yang Mulia, izin, Yang Mulia, dari Pemohon 229.

1185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:59]

He eh, kenapa?

1186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:59:00]

Yang Mulia, tadi mengenai perbedaan ... apa ... penjumlahan tadi yang disampaikan oleh Termohon, itu sebenarnya kami sudah melakukan renvoi pada tanggal 12 Desember. Cuma mohon izin ... mohon maaf, bukti pengajuan renvoi itu tidak kami bawa, karena yang mengajukan waktu itu rekan, sehingga pada waktu pembacaan Permohonan pun kami bacakan sesuai yang sudah kami renvoi.

1187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:23]

Ya.

1188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI [01:59:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

1189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:25]

Baik, terima kasih.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-97. Betul? Dinyalakan. T-1 sampai dengan T-97.

1190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: STEFANUS BUDIMAN [01:59:40]

Betul, Yang Mulia.

1191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:42]

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT sampai ... sampai PT-11? Betul?

1192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 229/PHPU.BUP-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:59:50]

Benar, Yang Mulia.

1193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:51]

Terus, Bawaslu PK.37.1-1 sampai dengan PK.37.7-12? Benar? ...

1194. BAWASLU: SOMUN KOBAK [02:00:00]

Benar, Yang Mulia.

1195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:01]

Baik, terima kasih.

Sekarang yang terakhir, Lanny Jaya. Jauh enggak, Lanny Jaya dari Yahukimo?

**1196. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:00:11]**

Jauh.

1197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:12]

Jauh. Berapa jam perjalanan udara?

**1198. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:00:16]**

1 jam.

1199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:18]

1 jam? Wah, kalau di sini 2 menit kita sudah geser.
Baik. Silakan, Termohon Kabupaten Lanny Jaya.

**1200. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:00:29]**

Assalamualaikum wr.wb.

1201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:31]

Walaikumsalam.

**1202. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:00:33]**

Om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua.

1203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:36]

Ya.

**1204. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:00:36]**

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum kami bacakan ringkasan jawaban. Kami agak mengajukan keberatan atas bukti yang baru diajukan oleh Pemohon hari ini. Karenanya, demi kepastian hukum, mohon agar bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh, Yang Mulia.
Izinkan kami membacakan (...)

1205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:55]

Yang mana, sebentar.
Oh, itu yang ... tadi NUK ketinggalan itu, ya?

1206. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:01:25]

Ya, Yang Mulia.

1207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:26]

Ya. Keberatan dicatat dalam Risalah Persidangan.

1208. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:01:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

1209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:33]

Nanti kita nilai.

1210. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:01:35]

Terima kasih.

1211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:36]

Ya, terus lanjut!

1212. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:01:37]

Izin dilanjutkan, Yang Mulia.

Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 285, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1. Untuk identitas, kami anggap dibacakan.

Lalu untuk selanjutnya, pada bagian Eksepsi terkait Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap dibacakan.

Eksepsi.

1. Mengenai Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur

dengan alasan bahwa Posita dan Petitem Permohonan bertentangan satu dan lainnya.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya, tidak terdapat pelaksanaan pemilihan pada 2 distrik, yakni Distrik Melagi dan Distrik Poga.

Namun, di sisi lain Pemohon mengakui perolehan suara di Distrik Poga dan Distrik Melagi masih dalam Permohonan yang sama. Bahwa selain ketidakjelasan tersebut, dalil Pemohon tidak jelas karena di satu sisi meminta Mahkamah untuk menyatakan Pemohon sebagai pemenang pemilihan kepala daerah. Namun, pada Poin 6, Petitem dalam Permohonan yang dibacakan Pemohon, meminta agar Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 atas nama (...)

1213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:49]

Kesimpulannya saja apa? Narasinya dianggap dibacakan.

1214. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:02:51]

Dianggap dibacakan.
Lalu (...)

1215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:54]

Kesimpulannya, apa ini?

1216. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:02:55]

Kesimpulannya, gugatan penggugat kabur, Yang Mulia.

1217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:59]

Oke, Permohonan kabur?

1218. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:03:01]

Permohonannya kabur.

1219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:02]

Oke. Terus, apa lagi?

**1220. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:03:03]**

Bahwa (...)

1221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:04]

Eksepsinya?

**1222. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:03:04]**

Dalam Pokok Permohonan.

1223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:07]

Ya.

**1224. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:03:08]**

Bahwa lebih dahulu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Lanny Jaya terdapat 2 metode pemilihan, yakni menggunakan sistem noken dan sistem one person, one vote, one value.

1225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:22]

Ya.

**1226. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:03:22]**

Ada 433 tempat pemungutan suara yang menggunakan sistem noken dan 20 tempat pemungutan suara yang menggunakan sistem nasional. Secara keseluruhan di Lanny Jaya terdapat 39 distrik.

1227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:39]

Yang noken berapa?

**1228. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:03:41]**

Yang noken 433 tempat pemungutan suara, Yang Mulia.

1229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:45]

400?

1230. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:03:46]

33.

1231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:46]

33.

1232. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:03:48]

Yang mana, keseluruhan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah distrik-distrik yang menggunakan metode noken.

1233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:53]

Noken?

1234. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:03:54]

Ya.

1235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:54]

Ya. Jadi, seluruhnya total berarti 453?

1236. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:03:57]

53, ya.

1237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:58]

Oke.

1238. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:03:59]

Benar, Yang Mulia.

Untuk jumlah daftar pemilih tetap terdapat 185.023, Yang Mulia. Tetapi yang memberikan suaranya 185.022, karena 1 pemilih itu pindah ke Sulawesi Tenggara. Pindah memilih.

1239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:17]

Oke.

1240. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:04:19]

Bahwa dalam proses rekapitulasi ... bahwa dalam proses pemilihan, itu juga terdapat ... dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 serentak pada 39 distrik, termasuk di Distrik Poga dan Distrik Melagi, Yang Mulia.

Lalu, dalam proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya juga mengeluarkan beberapa saran perbaikan. Yakni pada 5 distrik, Distrik Goa Balim, Distrik Yiluk, Distrik Muara, Distrik Mokoni, Dan Distrik Kolawa.

Dan keseluruhan saran perbaikan dari Bawaslu ini telah dilaksanakan, sehingga penetapan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Lanny Jaya setelah dilakukan saran perbaikan Bawaslu adalah Pasangan Nomor Urut 1, perolehan suara 75.493.

Pasangan Nomor Urut 2=79.084. Dan,

Pasangan Nomor Urut 3=30.445.

Keseluruhan total suara=185.022, Yang Mulia.

1241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:23]

Ya.

1242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:05:24]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menggunakan kalkulasi yang keliru ketika membandingkan suara menurut Pemohon. Pemohon mendalilkan,

Nomor Urut 1 memperoleh suara=78.874.

Nomor Urut 2=75.083. Dan,

Nomor Urut 3=29.072.

Yang mana keseluruhannya jika dijumlahkan hanya=183.029.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pemukulan, lalu kemudian ketidaknetralan Ketua Termohon, dan juga dalil yang menyerang pribadi Ketua Termohon yang memfitnah bahwa

Ketua Termohon adalah istri dari salah satu kerabat pasangan calon, adalah fitnah belaka, Yang Mulia.

1243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:14]

Ya.

1244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:06:15]

Dengan demikian, menurut Termohon hal yang didalilkan Pemohon pada bagian Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga adalah adil bagi Mahkamah untuk menolak Permohonan Pemohon.

Petitium.

1245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:26]

Ya.

1246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:06:26]

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2024, pukul 06.37 WIT.

Menetapkan.

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 yang benar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Pasangan Calon Yemis Kogoya (...)

1247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:14]

Eggak usah disebutkan. Nomor urut terus (...)

**1248. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:07:16]**

Nomor Urut 1 (...)

1249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:17]

Perolehan suaranya.

**1250. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:07:16]**

75.493.

Nomor Urut 2=79.084.

Nomor Urut 3=30.445.

Dengan total suara=185.022.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Anton Hariyadi dan kawan-kawan.

1251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:40]

Baik, terima kasih.

Sekarang, Pihak Terkait.

**1252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:07:46]**

Assalamualaikum wr. wb.

1253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:48]

Walaikumsalam.

**1254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:07:49]**

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pihak Terkait dalam hal ini adalah Paslon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

1255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:58]

Ya.

1256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:08:00]

Atas nama Pak Aletinus Yigibalom dan Fredi Ginia Tabuni, yang memberikan kuasa kepada kami dari kantor Postulat Political and Concultant Law Consulting. Kami punya materi yang kami sudah sampaikan ke Panitera tadi.

1257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:16]

Oke. PowerPoint-nya?

1258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:08:17]

PowerPoint-nya, Yang Mulia.

1259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:19]

Silakan. Berapa slide ini?

1260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:08:23]

Slidenya, saya enggak hitung lagi, Yang Mulia.

1261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Ya.

1262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:08:26]

Tapi, saya sudah hitung kira-kira waktunya nanti akan sama dengan Pemohonan lalu, Yang Mulia.

1263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:30]

Oke.

1264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:08:32]

Pertama, kami perlu menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa Pemohon untuk PHP Lanny Jaya itu hanya 1, yaitu Paslon Nomor 1, tetapi

Permohonannya ada 2. Di sidang tanggal 16 Januari lalu, dari 2 Perkara itu, 1 Perkara yaitu Perkara 289 dicabut dan diteruskan yang 285, yang hari ini disidangkan.

1265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:56]

Ya.

1266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:08:57]

Nah, atas alasan itu kami menyusun keterangan Pihak Terkait ini untuk Perkara 285 dengan tetap mengajukan ... dengan tetap akan mengaitkan adanya 2 Permohonan pada bagian Eksepsi nanti, Yang Mulia.

Kami bacakan terlebih dahulu, mohon izin untuk Eksepsi, Yang Mulia.

1267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:14]

Ya.

1268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:09:14]

Poin-poinnya saja. Yang pada intinya adalah setelah kami membaca uraian Permohonan Pemohon, memang yang dipersoalkan itu adalah pada proses, bukan pada hasil. Pada proses ini adalah tuduhan pelanggaran yang terjadi pada tahapan sebelum hasil yang itu ternyata, tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai 159 Undang-Undang Pilkada.

Yang mestinya pelapor ... pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan itu, itu dilaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk itu seperti Bawaslu, KPU, DKPP, dan seterusnya.

1269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:59]

Ya, ini untuk Eksepsi ini, dianggap dibacakan.

1270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:03]

Mohon izin, Yang Mulia. Karena 40% dari keterangan kami itu memang terkait dengan Eksepsi karena memang banyak sekali yang bermasalah (...)

1271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:10]

Ya, ya, ini (...)

1272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:10]

Kami akan agak percepat, Yang Mulia.

1273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:12]

Berarti kesimpulannya tidak berwenang, kan?

1274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:14]

Tidak berwenang karena ini ada persoalan juga (...)

1275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:16]

Yang penting-pentingnya saja ... yang di ... anu ... yang dibaca.

1276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:17]

Ya, Yang Mulia. Karena juga tidak ada laporan keberatan pengajuan di model ... di Form C. Keberatan, itu juga sama sekali tidak ada. D. Juga tidak ada, Yang Mulia.

1277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:29]

Ya.

1278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:29]

Baik, di kabupaten maupun di tingkat distrik terhadap yang dipersoalkan tidak ada sama sekali (...)

1279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:35]

Ya.

1280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:36]

Keberatan yang diajukan sebagaimana diatur dalam PKPU, Yang Mulia.

1281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:40]

Ya.

1282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:10:40]

Lalu kemudian, kami juga berpegang kepada Putusan Mahkamah Nomor 8/2016 dan 1/2017. Yang pada pokoknya, Mahkamah menekankan bahwa harus ada pemilahan tentang lembaga yang berwenang menyelesaikan sehingga tidak semua permasalahan dibawa ke Mahkamah. Kecuali memang sudah diajukan di awal lalu, tidak mem... puas baru bisa dibawa. Tetapi kalau sama sekali tidak diproses, maka tidak mungkin sampah Pilkada dibawa semuanya ke MK.

Lalu yang kedua, Yang Mulia. Ini kaitannya dengan Permohonan yang 2 tadi, Yang Mulia.

1283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:12]

Ya.

1284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:11:12]

Jadi ada 1 Pemohon, 2 Permohonan. Tentu saja ini melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 3, yang secara tegas melarang pengajuan Pemohon ... Permohonan sebanyak lebih dari 1 kali. Yang kami ingin tekankan di sini, Yang Mulia, walaupun sudah dicabut 289 (Perkara 289). Tempus yang diatur di PMK 3 itu adalah selama tenggang waktu pengajuan. Jadi larangan atau pembatasannya itu pada masa pengajuan Permohonan, bukan pada saat di sidang. Itu yang kami ingin tekankan, Yang Mulia.

Jadi, kami juga melihat dengan ada 2 Permohonan itu menunjukkan bahwa ini adalah Permohonan yang tidak sungguh-sungguh, tidak beritikad baik, ya, cacat kehendak, sehingga menjadi tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam hal ini adalah Pihak Terkait. Oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon harus menyatakan tidak dapat diterima.

Untuk Eksepsi yang ketiga, Yang Mulia. Ini tentang obscur libel, yang memang cukup banyak kami temukan, dan bahkan sa ... amat sangat banyak. Yang pada pokoknya ada tiga.

Yang pertama, adalah rumusan di Posita. Yang kedua, pertentangan Posita dan Petitum. Yang ketiga, adalah kontradiksi antar Petitum.

Nah, kalau kami berikan beberapa contoh saja, Yang Mulia. Misalnya Pemohon mendalilkan ada peningkatan suara untuk Paslon Nomor 3 di Distrik Kolawa. Pada bo ... poin sebelumnya disebutkan peningkatannya 100 suara, berikutnya disebut 291 suara. Tidak konsisten, Yang Mulia.

Lalu, pada Distrik Muara juga, misalnya disebutkan ada 11 kelurahan, di sana tidak ada kelurahan, Yang Mulia. Kelurahan hanya ada di Distrik Tiom, 1 kelurahan saja, yang ada adalah kampung, dan jumlahnya juga bukan 11, tapi 10.

Lalu, kemudian di Buguk Gona juga begitu, disampaikan ada 12 kelurahan, tidak ada kelurahan di sana, kecuali adanya di Kelurahan Bokon di Distrik Tiom, disebutkan juga 12 kelurahan yang enggak benar adalah 13 kampung tanpa ada kelurahan.

Lalu, di Distrik Muara juga ada angka yang berbeda, yang diklaim oleh Pemohon, itu antara C.Hasil dan D.Hasil itu sama. Ternyata apa yang dituliskan sendiri oleh Pemohon dalam Permohonannya, misalnya di halaman 20, itu ternyata justru berbeda, Yang Mulia.

Di TPS Gipura, TPS 1 Gipura, Distrik Muara. di halaman 21 yang Pemohon dalilkan itu, yang menyatakan hasilnya sama, ternyata setelah kita cek, berbeda juga, Yang Mulia, antara C.Hasil dan D.Hasil. Di Distrik Muara juga disebut bahwa Pemohon mengalami pengurangan sebanyak 400 suara, tapi pada bagian berikutnya disebut lagi 350 suara. Tidak ... tidak cukup jelas, Yang Mulia.

Di Distrik Muara juga, dia menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara kepada Pemohon, kep ... kemudian ada penambahan untuk Paslon 2, Pihak Terkait, dan Paslon 3. Sehingga kalau dihitung total suaranya=5.036, 5.036 suara. Tetapi setelah kami hitung, apa yang dibuat sendiri oleh Pemohon, kami hitung ulang, ternyata total suaranya itu=5.086. Jadi, ada selisih=50 suara. Padahal itu angka-angka yang diklaim sendiri oleh Pemohon.

Di Buguk Gona, Pemohon misalnya di halaman 24 mendalilkan, memperoleh suara=1.562. Tetapi, setelah kita hitung apa yang dibuat dalam tabel oleh Pemohon itu, sebetulnya bukan=1.562, tapi=1.532. Begitu juga, yang oleh Pemohon disebut Paslon 2, (Pihak Terkait) mendapatkan suara=3.938, setelah kami hitung berdasarkan angka-angka Pemohon sendiri, itu sebetulnya=4.267.

Di pa ... di Paslon 3, disebut oleh Pemohon mendapat suara=646, 646 setelah kami hitung, apa yang didalilkan oleh Pemohon sendiri=696. Jadi, cara menghitungnya saja berbeda semua, Yang Mulia.

1285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:16]

Ya. Itu (...)

1286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:15:17]

Lalu (...)

1287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:17]

Yang model-model begini dianggap dibacakan, ya.

1288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:15:19]

Nah, ini yang paling penting, Yang Mulia. Yang ... yang poin ini, Yang Mulia.

Jadi, Pemohon menyatakan bahwa ada=80.700 suara yang benar menurut Pemohon, ya ... Pihak Terkaitnya itu=74.093 suara. Ini bisa dilihat di sini, Yang Mulia (...)

1289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:38]

Ya.

1290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:15:38]

Di tabel. Nah, di sini, terlihat sekali, Yang Mulia. Ada inkonsistensi di satu sisi di Positanya menyebutkan dapatnya=80.700, tetapi di Petitem mintanya=78.874. Lalu juga untuk Terkait=74.093, itu diminta=75.083. Anehnya, kalau kita hitung hasil di Posita yang Pemohon buat, itu 187.098. Padahal, DPT-nya saja hanya 185.023, Yang Mulia. Di sini keanehannya betul-betul nyata adanya.

Oleh sebab itu, kami persingkat, Yang Mulia. Kami mem ... pada bagian pertengahan di Petitem alter ... alternatif (...)

1291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:21]

Ini berarti anu, ya, suara sahnya berapa?

1292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16:24]

Ya. Jadi, di ... di total suara sah kalau menurut Termohon, kan, Yang Mulia, itu kan 185.022. di (...)

1293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:31]

He eh. DPT-nya kok 18.523[sic!], ya?

1294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16:35]

Nah, di ... ya, itu 0850 (...)

1295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:39]

23.

1296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16:40]

Ya, 23, mohon maaf.

1297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:41]

Ya.

1298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16:41]

Nah, sedangkan di Posita, Pemohon menyatakan angka-angkanya adalah 80.000 buat mereka, 74.000 untuk Pihak Terkait, dan sebagainya.

1299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:48]

Ya. Jumlahnya melebihi DPT-nya?

1300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16:51]

Jadi, melebihi DPT-nya, Yang Mulia.

1301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:52]

Oke.

1302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:16:53]

Ini menunjukkan ketidakjelasan, Yang Mulia. Bahkan lebih dari itu, kalau kita lihat kepada Petitem alternatif 4, ya, meminta Mahkamah mendiskualifikasi, ya. Tetapi, sama sekali tidak ada satupun uraian ... saya ulangi, tidak ada satupun uraian yang mendasari alasan, kenapa kam ... Pihak Terkait harus didiskualifikasi? Itu sama sekali tidak ada.

Lalu, ada pertentangan Petitem, yaitu di Petitem 2 dengan Petitem 3, ya. Yang minta pada satu sisi pembatalan objek sengketa, tetapi pada Petitem al ... Petitem alternatif 3, meminta mengembalikan pengurangan suara Pemohon di 6 distrik. Tentu saja ini saling bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan atau non-executable.

1303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:37]

Ya.

1304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:17:38]

Lalu, di ... secara singkat, kami bacakan saja, Yang Mulia, yaitu pertentangan di Petitem alternatif 2 dan alternatif 6, itu di halaman 60.

Kemudian, alternatif ... Petitem alternatif 4 dengan Petitem alternatif 2 juga begitu, meminta mendiskualifikasi, tetapi pada sisi lain meminta agar Mahkamah membatalkan objek sengketa. Artinya, Pemohon meminta pembatalan perolehan suara dari seluruh Paslon minta dibatalkan. Jadi, ini kan bertentangan untuk 2 Petitem itu.

Lalu, di Petitem alternatif 4 dan Petitem alternatif 5. Di sini juga ada pertentangan, meminta di satu sisi diskualifikasi Pihak Terkait, tetapi di alternatif 5 meminta Mahkamah melaksanakan PSU, yang di dalamnya tentu saja termasuk Pihak Terkait.

Ketidakjelasan Petitem muncul kembali di alternatif 4, meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi, tetapi Pemohon tidak meminta pembatalan SK Penetapan Pihak Terkait yang dulu ditetapkan sebagai peserta Pilkada dan ditetapkan nomor urutnya. Jadi (...)

1305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:54]

Berarti anu ... kesimpulannya antar-Petitum sendiri tidak konsisten, ya?

1306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:17:58]

Ya. Jadi ... ya, kami bersingkat, Yang Mulia.

Terakhir untuk ... apa ... untuk Eksepsi.

Jadi, di Petitum angka 6 tidak sesuai itu dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 5 PMK 3.

1307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:14]

Ya.

1308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:18:14]

Yang harusnya minta pembatalan, tapi meminta Pemohon ditetapkan sebagai bupati/wakil bupati terpilih.

Terakhir. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti Permohonan Pemohon penuh dengan ketidakjelasan, inkonsisten, dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut Pihak Terkait harus dinyatakan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsional tersebut, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk memutus perkara a quo dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, dilanjutkan untuk Pokok Perkara oleh rekan saya, Pak Nasef, Yang Mulia.

1309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:47]

Ya, silakan.

1310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:48]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:51]

Ya.

1312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:18:51]

Terkait Pokok Perkara.

Jadi, Pokok Perkara ini, kami membuat Keterangan setelah melakukan inzage pada tanggal 21 Januari 2025 yang lalu, Yang Mulia.

1313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:00]

Ya.

1314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:01]

Jadi, kami menemukan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon ini, ini banyak yang dimanap ... dimanipulasi, Yang Mulia.

Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, apa yang sudah ditetapkan Termohon itulah suara murni yang berasal dari pemungutan suara di TPS. Kami menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

1315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:21]

Ya.

1316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:22]

Menurut Pihak Terkait, telah terjadi upaya sistematis untuk merusak kemurnian suara hasil noken atau ikat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan/atau tim pemenangnya.

1317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:36]

Ya, narasinya itulah dianggap dibacakan, ya.

1318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:38]

Baik.

1319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:39]

Terus?

1320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:39]

Kami membacakan modus-modusnya saja, Yang Mulia.

1321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:41]

Ya.

1322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:42]

Misalnya, ada kesepakatan antara Paslon 01 dan 03 untuk mengalihkan suara setelah rekap di tingkat distrik, Yang Mulia.

1323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:50]

Oke.

1324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:51]

Padahal noken ini kan harusnya di TPS, Yang Mulia.

1325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:53]

Ya.

1326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:20:54]

Kemudian Pemohon atau timnya juga melakukan intervensi dan intimidasi kepada PBBDD ... PPD mohon maaf, untuk mengubah perolehan suara baik di C.Hasil maupun D.Hasil. Caranya adalah dengan melakukan tipp-ex. Jadi, banyak sekali tipp-ex di C.Hasil yang kami temukan, Yang Mulia, terhadap perolehan su ... perolehan suara masing-masing Paslon. Tentu hal ini melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (8) PKPU/17/2024 karena tipp-ex tidak ada dasar hukumnya di situ, Yang Mulia.

Kemudian, hasil ... C.Hasil yang telah direkayasa itu, itulah yang kemudian diunggah di Sirekap, Yang Mulia. Mungkin bisa ditampilkan

slide berikutnya. Jadi, ada jeda waktu yang cukup lama antara pemungutan suara dengan pengungkapan C.Hasil. Nah, di jeda waktu ini kami duga, Yang Mulia, disinilah ada upaya manipulasi terhadap angka-angka perolehan. Bahkan di beberapa unggahan kami lihat dari Sirekap itu bahkan diunggah pada tanggal 7 Desember. Dimana pada saat itu sudah dilakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. Nah, ini menurut kami jeda waktu ini yang dimanfaatkan oleh oknum tim Pemohon untuk memanipulasi.

Kemudian, berikutnya di tanggapan masing-masing distrik misalnya, kami mulai dari Distrik Yiluk, misalnya. Ini yang sangat kelihatan sekali tipp-ex yang dilakukan oleh oknum tim Pemohon, Yang Mulia. Nah, kalau kita lihat memang terjadi perubahan angka-angka yang signifikan. Misalnya, yang harusnya Pihak Terkait itu mendapatkan suara karena di tipp-ex ini kosong semuanya. Semuanya dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga seharusnya misalnya kalau di Yiluk itu, di TPS yang tadi kami sampaikan ini, di Jilekme harusnya 01 itu dapat=1.05 dan 02 Pihak Terkait itu dapat=3.05. Tetapi faktanya di C.Hasil yang dihadirkan ini diunggah di Sirekap, itu semua suaranya dialihkan. Jadi, Pemohon mendapatkan=410 suara, itu, Yang Mulia.

Kemudian, yang perlu kami sampaikan juga adalah dengan banyaknya manipulasi ini, menurut Pihak Terkait maka suara yang paling otentik, yang paling genuine, yang paling murni itu adalah suara hasil rekapitulasi tingkat distrik, Yang Mulia. Nah, untungnya pada saat Pleno di tingkat distrik, di masing-masing distrik itu ada alat bantu papan Pleno yang disiapkan.

Tadi sampaikan oleh di kabupaten lain juga seperti itu, kalau kita lihat tadi di Yahukimu juga seperti itu. Jadi, Pleno rekapitulasi di tingkat distrik itu dilakukan secara terbuka, di ruang terbuka. Semua masyarakat, tim pasangan calon pun di situ ikut, Yang Mulia. Sehingga hasil suara masing-masing kampung, masing-masing TPS yang dimuat dalam papan Pleno ini, ini kemudian secara terbuka bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Sehingga kalau ada keberatan misalnya atau bantahan terhadap angka-angka itu, pada saat itu harusnya bisa langsung diperbaiki. Nah, faktanya ketika itu suara-suara itu dicantumkan dalam papan Pleno ini tidak ada keberatan sama sekali, Yang Mulia. Dan, inilah yang kemudian, perolehan suara yang paling otentik menurut Pihak Terkait, Yang Mulia.

1327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:09]

Ya.

1328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:24:09]

Dan di daerah-daerah ... mohon maaf ulangi, di distrik-distrik lain pun seperti itu.

1329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:13]

Sama, ya?

1330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:24:14]

Di Mokoni, kemudian (...)

1331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:15]

Ya.

1332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:24:16]

Goa Balim, Kolawa (...)

1333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:17]

Ya.

1334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:24:18]

Dan seterusnya.

Nah, bahkan ada satu lagi modus yang dilakukan oknum ini adalah misalnya dengan memalsukan tanda tangan saksi, Yang Mulia, di Formulir D.Hasil maupun C.Hasil. Yang kami kasih contoh misalnya di sini, ada di Distrik Muara, mungkin bisa ditampilkan di slide berikutnya, Distrik Muara, terus ke bawah ... ah, ini, Yang Mulia.

Jadi, ada misalnya tanda tangan saksi paslon 02 Pihak Terkait atas nama Liben Wenda yang tertera di Formulir D.Hasil. Padahal kami sudah klarifikasi ke yang bersangkutan, dia tidak pernah melakukan tanda tangan di Formulir D.Hasil ini. Dan itu juga terungkap fakta pada saat Pleno di tingkat Kabupaten Lanny Jaya.

Nah, cara-cara ini yang menurut kami, Yang Mulia, tentu tidak dibenarkan. Dan kemudian berikutnya, kalau terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada di 2 distrik tidak ada pemilihan, ini kami

bantah juga, Yang Mulia. Karena faktanya di 2 distrik itu misalnya di Distrik Melagi dan Poga, kami mencantumkan di sini juga bukti-bukti foto dan videonya, Yang Mulia.

Itu memang juga dilakukan pemilihan. Jadi, bukan enggak ... tidak ada pemilihan tapi ada pemilihan. Terbukti misalnya logistik diberikan, kemudian pada ... pada tanggal 27 November 2024, itu dilakukan pemilihan pemungutan suara dan juga ada Plenonya, mulai dari tingkat distrik sampai dengan Kabupaten/Kota, Yang Mulia.

Sehingga berdasarkan bantahan tersebut, kami mohon agar seluruh dalil-dalil beserta bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, itu mohon dikesampingkan dan ditolak.

1335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:52]

Ya.

1336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:25:52]

Dan kesimpulan dari semua ini, Yang Mulia.

Kalau kami melihat, bahwa ternyata kecurangan itu justru dilakukan oleh Pemohon. Sehingga berlaku asas universal dalam hukum tidak seorang pun boleh diuntungkan, oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain.

1337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:14]

Ya.

1338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:26:14]

Nah (...)

1339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:15]

Sekarang Petitumnya sudah cukup ini.

1340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:26:16]

Cukup, Yang Mulia.

1341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:17]

Ya.

1342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:26:17]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara,

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 79 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Menyatakan perolahan suara yang benar adalah sebagai berikut:

01=75.493.

02=79.084 suara

Dan, 03=30.445 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Yang Mulia, hormat kami Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

1343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:11]

Baik, terima kasih.

Bawaslu, saya persilakan. Ada resumennya, Bu?

1344. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:27:20]

Izin, Yang Mulia, ada.

1345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:21]

Berapa halaman itu resumennya?

1346. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:27:24]

3 halaman.

1347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:25]

Oke, silakan dibaca.

1348. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:27:33]

Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, terhadap Perkara Nomor 285.

Keterangan tersebut telah di-Plenokan oleh ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon.
 - 1.1. Bahwa berkenaan dengan dali Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
 - 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, Kabupaten Lanny Jaya yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 15 tertanggal 5 Desember, sebagai termuat dalam laporan hasil pengawasan terjadi penyanderaan yang dilakukan oleh masyarakat massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 kepada anggota Bawaslu, Kabupaten Lanny Jaya atas nama Dorkas Tabuni di Kantor KPU Kabupaten Lanny Jaya.
 - 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada tahap rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 7, 10, 11, 13, dan tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, pada pokoknya tidak ada temuan, laporan, dan keberatan.
 - 1.4. Bahwa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan formulir D.Hasil-KWK Bupati, Wali Kota, dianggap dibacakan.
 - 1.5. Izin Yang Mulia, sedikit menambahkan terkait adanya penyanderaan terhadap Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan anggota Bawaslu di Hotel Nawi Abua Tiom pada tanggal 9 sampai 11 desember 2024 dan dilanjutkan Pleno Rekapitulasi di tanggal 11 Desember 2024, pukul 20.00 WIT, namun diskors lagi karena terjadi keributan di tempat Pleno Rekapitulasi. Pada tanggal 12 Desember 2024, masa pendukung saling menyerang, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dari masing-masing masa Paslou, masi ... izin maaf, Yang Mulia, masing-

masing masa pendukung Paslon, serta membakar rumah Anggota Bawaslu, Kabupaten Lanny Jaya.

2. Bahwa dalil Permohonan[sic!] terkait pengurangan suara pada 39 distrik di Kabupaten Lanny Jaya.
 - 2.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 47 tanggal 29 November 2024.
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 057, tanggal 9 Desember 2024.
 - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi hasil suara pada tingkat kabupaten sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 21 pada tanggal 7 Desember, Nomor 22 pada tanggal 11 Desember, Nomor 23 pada tanggal 14 Desember sebagaimana yang telah diuraikan dalam keterangan.
 - 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten dengan Nomor 56, tanggal 7 Desember, untuk Distrik Goa Balim, Saran Perbaikan Nomor 62, 7 Desember, untuk Distrik Yiluk, saran perbaikan Nomor 52, tanggal 5 Desember, untuk Distrik Muara, saran perbaikan Nomor 51, tanggal 5 Desember untuk Distrik Mokoni, dan saran perbaikan Nomor 50, tanggal 4 Desember untuk Distrik Kolawa.

Atas dasar ... ada hasil pengawasan dari Panwas Distrik terkait perubahan C.Hasil ketika di input ke dalam Sirekap, PPD melakukan tipp-ex C.Hasil. Dan adanya penggabungan suara dari perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 ke Nomor Urut 1, pada Distrik Yiluk, Distrik Mokoni, dan Distrik Goa Balim. Dan untuk Distrik Muara, Distrik Kolawa, karena adanya perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya pada halaman 7 sampai dengan 9.

Izin, Yang Mulia, membacakan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, yang sudah ditindak lanjuti KPU Kabupaten Lanny Jaya.

Satu (...)

1349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:34]

Itu, yang termasuk tiga halaman tadi? Ada (...)

1350. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:33:36]

Ya, Yang Mulia.

1351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:38]

Ya, silakan.

1352. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:33:39]

Yang ketiga, halaman yang ketiga, Yang Mulia.

1353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:40]

Ya, silakan.

1354. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:33:45]

1. Distrik Goa Balim.
Nomor Urut 1=714.
Nomor Urut 2=2.459.
Nomor Urut 3=919.
2. Distrik Mokoni.
Nomor Urut 1=2.196.
Nomor Urut 2=1.816.
Nomor Urut 3=326.
3. Distrik Kolawa.
Nomor Urut 1=445.
Nomor Urut 2=3.213.
Nomor Urut 3=291.
4. Distrik Yiluk.
Nomor Urut 1=2.270.
Nomor Urut 2=1.200.
Nomor Urut 3=551.
5. Distrik Muara.
Nomor Urut 1=4.058.
Nomor Urut 2=561.
Nomor Urut 3=467.

1355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:55]

Ya, itu selanjutnya dianggap dibacakan. Saya minta dibacakan perolehan suara terakhir yang benar menurut ka ... anu ... Bawaslu berapa? Itu dianggap dibacakan.

1356. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:35:07]

Siap, Yang Mulia.

1357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:10]

Perolehan.

1358. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:35:11]

Nomor Urut 1. Perolehan Nomor Urut 1=75.493.

1359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:18]

Ya.

1360. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:35:18]

Perolehan Nomor Urut 2=79.084.

1361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:23]

Ya.

1362. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:35:23]

Perolehan Nomor Urut 3=30.445.

1363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:28]

Total suara sah?

1364. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:35:31]

1.000 ... maaf, Yang Mulia, 185.022.

1365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:39]

Baik, terima kasih. Cukup, ya?

1366. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:35:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

1367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:44]

Terima kasih. Prof. Enny, ada, Prof? Silakan.

1368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:50]

Ya, saya ada sedikit saja ini.

Terkait dengan 2 distrik yang didalilkan Pemohon, Distrik Melagi dan Distrik Poga. Itu yang didalilkan tidak ada noken, tapi ada C.Hasil. Itu bukti yang diajukan oleh Termohon, T-26, T-27 itu video saja? Ada bukti lain? C.Hasil atau D.Hasil?

1369. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:36:15]

Kami ajukan karena di situ dimintakan adanya pemilihan, maka yang kami buktikan adalah (...)

1370. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:24]

Proses pemilihan?

1371. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:36:25]

Proses pemilihan, Yang Mulia.

1372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:25]

C.Hasil, D.Hasilnya punya, enggak?

1373. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:36:29]

Sebentar, Yang Mulia.

1374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:29]

Tidak ada? Kalau Pihak Terkait, apa yang diajukan buktinya? Pihak Terkait, apa yang diajukan buktinya untuk Distrik Melagi dan Distrik Poga?

1375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:36:39]

Untuk Pihak Terkait sama, Yang Mulia. Ada foto-foto pelaksanaan yang tadi kami tampilkan juga.

1376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:44]

Itu?

1377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:36:44]

Kemudian, ada video juga pada saat pemilihan.

1378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:47]

C.Hasil?

1379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:36:48]

Nah, seperti yang saya ... yang kami sampaikan tadi, untuk C.Hasil memang kita tidak mendapatkan, Yang Mulia. Jadi (...)

1380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:55]

Tidak ada di situ?

1381. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:36:55]

Ya.

1382. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:36:55]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

1383. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:58]

Siapa ini? Termohon?

**1384. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:36:59]**

Dari Termohon.

1385. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:59]

Silakan.

**1386. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:00]**

C.Hasil dan D.Hasil untuk kedua distrik tersebut ada, Yang Mulia.

1387. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:02]

Ada?

**1388. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:03]**

Ada.

1389. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:04]

Di T berapa itu?

**1390. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:05]**

Belum kami ajukan, Yang Mulia.

1391. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:06]

Oh, belum diajukan.

**1392. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:07]**

Ya.

1393. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:09]

Jadi, ada semua, ya. Jadi telaksana pada prinsipnya (...)

**1394. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:12]**

Ya.

1395. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:12]

Di 2 distrik (...)

**1396. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:12]**

Ya.

1397. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:12]

Tersebut, ya?

**1398. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:13]**

Karena dalilnya adalah pelaksanaan, maka kami bantah dengan bukti pelaksanaan.

1399. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:17]

Oh. Yang kemudian, kalau di Distrik Poga itu, yang menang justru Paslon Nomor 3, ya? Betul kan, ini? Di halaman 34 itu, ya?

**1400. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:28]**

Benar, Yang Mulia.

1401. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:30]

5.047 itu, ya? Kemudian, kalau di Melaginya yang menang adalah Paslon Nomor 2 itu, ya? Itu dari KPU, itu?

**1402. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:37:39]**

Benar, Yang Mulia.

1403. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:40]

Betul itu, ya?

1404. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:37:41]

Benar.

1405. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:37:43]

Baik, terima kasih.

1406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:45]

Baik.

Ini ... anu ... untuk kepentingan Mahkamah, maka tadi yang belum disampaikan di C.Hasil 2 tadi. Supaya (...)

1407. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:37:56]

Baik, Yang Mulia.

1408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:57]

Serah ... serahkan ke Mahkamah.
Diambil petugas.

1409. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:38:00]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk 2 bukti tersebut, belum kami leges, mungkin bisa kami susul (...)

1410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:04]

Eggak, tidak usah dileges. Nanti kita yang minta soalnya, itu.

1411. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:38:09]

Oh. Baik, Yang Mulia.

1412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:10]

Nanti, kita lihat apa absah atau apakah, ya ... tidak.

1413. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:38:13]

Sementara mungkin, softfile-nya dulu mungkin diberikan, Yang Mulia.

1414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:15]

Oke, kalau anu ... anunya, enggak ada?

1415. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:38:19]

Hardcopy-nya kebetulan masih di tempat kami, Yang Mulia. Tidak kami bawa kemari.

1416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:24]

Tapi, softcopy-nya ada?

1417. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:38:26]

Softcopy-nya, carikan ada, Yang Mulia.

1418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:28]

Ya, bisa diminta softcopy-nya?

1419. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:38:32]

Sebentar, saya carikan dulu, Yang Mulia.

1420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:33]

Bawaslu, punya enggak ini, bukti ini? Yang dilihat 2 yang dipersoalkan, yang bahwa di situ bukan noken, tapi tidak ada noken, tapi one man one vote, kan. Tapi, ada foto-foto kegiatannya. Tapi, C.Hasilnya tidak dilampirkan sebagai bukti oleh Termohon dan Pihak Terkait. Bawaslu punya, enggak?

1421. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:38:56]

Kami punya, Yang Mulia.

1422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:59]

Di ... sudah di jadikan (...)

1423. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:38:59]

Rekapan di distrik. Rekapan (...)

1424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:00]

Sudah dijadikan bukti?

1425. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:39:01]

Sudah, Yang Mulia.

1426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:03]

PK berapa? PK-3 berapa? Ini PK-321 ... sampai PK-320. Itu yang PK-2, berapa?

1427. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:39:27]

7 sampai 9, Yang Mulia.

1428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:32]

Distrik apa itu?

1429. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:39:34]

Distrik Melagi dan Distrik Poga.

1430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:37]

Oke, itu ada, ya?

1431. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:39:38]

Ada, Yang Mulia.

1432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:38]

Diulangi, PK berapa? 37?

1433. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:39:42]

PK.37, 7 sampai 9, Yang Mulia.

1434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:46]

Tu ... 37 ... 3, 7 sampai 9.

Jadi, enggak perlu itu, soalnya kita sudah dapat dari Bawaslu.

1435. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:39:55]

Baik, Yang Mulia.

1436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:56]

Ya, terima kasih.

Saya sahkan buktinya (...)

1437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:40:00]

Izin, Yang Mulia?

1438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:02]

Dari mana?

1439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:40:02]

Pihak Terkait.

1440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:03]

He eh.

1441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:40:04]

Kami juga ada 4 alat bukti, Yang Mulia, terkait dengan persoalan tadi, Yang Mulia.

1442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:09]

Sudah cukup.

1443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:40:10]

Ya.

1444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:10]

Sudah ... anu ... dari Bawaslu soalnya.

1445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:40:12]

Terima kasih.

1446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:13]

Ya. Pemohon yang tadi di ... ada keberatan, catatan, dari Pihak Termohon, ya? Mengenai bukti tambahannya, ya?

1447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SOEPRİYADI [02:40:24]

Benar, Yang Mulia.

1448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:24]

Karena bukti tambahannya baru diserahkan pada persidangan sore hari ini, saya anu ... disahkan. Ini bisa menjadi bukti yang sah kalau persidangannya dilanjutkan ke sidang pembuktian, ya. Tapi sudah dimasukkan, disahkan. 789.

1449. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:40:58]

Baik. Ini kalau dicek Bukti Bawaslu, Bukti PK-789 tadi, itu bukan di Distrik Melagi dan Poga yang dipersoalkan. Itu di Distrik Yiluk, Muara,

dan distrik ... Distrik Muara satu lagi Distrik Mako ... Mokoni. Nah, yang Distrik Melagi dan Poga di nomor berapa, Bu?

1450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:36]

Kalau begitu, untuk anu (...)

1451. PEMBICARA: [02:41:38]

Izin?

1452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:39]

Untuk pembanding, dari Pihak Terkait tadi ada?

1453. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:41:43]

Bukan, Yang Mulia. Maksudnya untuk ... bu ... bukan C.Hasil, tapi bukti pelaksanaannya, Yang Mulia.

1454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:47]

Oh, kalau bukti pelaksanaan sudah anu ... ini kita minta C.Hasil nya, ada? Ya, kalau, gitu, softcopy-nya tadi. Ha? Softcopy-nya baru dicarikan?

1455. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:42:02]

Masih dicarikan karena belum connect ke internet, Yang Mulia.

1456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:02]

Dicari ... dicari ke Lanny Jaya?

1457. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA [02:42:03]

Ndak, kebetulan di kantor kami, Yang Mulia.

1458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:08]

Oke. Ya, sudah, ya. Besok diserahkan, ya. Kalau ada ... bisa sekarang, langsung bisa softcopy-nya.

**1459. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:42:23]**

Baik, Yang Mulia, kami upayakan. Mungkin kalau tidak bisa hari ini, kami ajukan pada hari kerja berikutnya.

1460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:31]

Hari kerja berikutnya itu masih seminggu lagi itu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Imlek. Ya, pesta Imlek lupa, ya. Jadi, enggak usah itu jadinya. Ya, kita anggap sudah cukuplah untuk pembuktian nanti. Terima kasih, ya.

Jadi, Bukti Pemohon P-81, P-92 ini disahkan, tapi nanti kita nilai, apakah masih bisa berlaku untuk pembuktian yang sekarang atau kalau ada sedang lanjutan.

Disahkan.

KETUK PALU 1X

**1461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SOEPRİYADI [02:43:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:06]

Kemudian Pihak Termohon, T-1 sama dengan T-29?

**1463. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD WIMAN WIBISANA
[02:43:14]**

Benar, Yang Mulia.

1464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:16]

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-31?

**1465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
285/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAID SALAHUDIN [02:43:19]**

Betul, Yang Mulia.

1466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:21]

Bawaslu, PK.37.3-1 sampai 37.3-20?

1467. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:43:27]

Benar, Yang Mulia.

1468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:29]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Itu kok salah tadi diminta, kok masih salah. Apa memang enggak ada?

1469. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:43:35]

Ada, Yang Mulia.

1470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:36]

Ha?

1471. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:43:36]

Sudah dimasukkan, Yang Mulia.

1472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:39]

Di PK be ... anu ... PK berapa? 37 berapa?

1473. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:43:45]

Izin, Yang Mulia. Saya cari dulu. PK.19, Yang Mulia, izin.

1474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:58]

Coba, sebentar, dicek PK.19. Yang 19 Poga? Melagi nya belum? Harus naik pesawat nyarinya?

1475. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:44:52]

Izin, Yang Mulia, yang Melagi 19.

1476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:55]

Oh, Melagi ... Melagi 19?

1477. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:44:58]

Ya, Yang Mulia.

1478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:58]

Poga nya 19? Yang Poga 19 ini, Melagi-nya berapa?

1479. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:45:06]

Ya. Minta maaf, Yang Mulia. Yang Melagi 18, Poga 19.

1480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:10]

Oh, 18, betul. Ya sudah ada. Jadi Buktinya PK.37.3-18 dan PK.37.3-19 sudah ada, ya.

Terima kasih, Bawaslu.

1481. BAWASLU: DORKAS TABUNI [02:45:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

1482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:45:39]

Izin, Yang Mulia?

1483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:41]

Sebentar, sebentar.

1484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:45:41]

Sedikit.

1485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:19]

Pihak Terkait belum menyerahkan PT-18?

1486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:45:56]

Ya. Betul, Yang Mulia.

1487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:57]

Ha?

1488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:45:58]

Betul.

1489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:58]

Di daftar alat bukti ada, itu belum (...)

1490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:46:00]

Ya (...)

1491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:00]

Diserahkan?

1492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:46:01]

Ya. Kami tarik saja itu, Yang Mulia. Yang PT-18 (...)

1493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:03]

Oh, ini dianggap tidak ada, ya. PT-18 dianggap tidak ada. Betul? Sudah? Terus apa tadi yang mau disampaikan?

1494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:46:11]

Jadi sebenarnya untuk dua distrik ini, ini untuk C.Hasil juga memang Pemohon juga mengajukan. Jadi ada inkonsistensi, Yang Mulia. Jadi di satu sisi dianggap tidak ada pemilihan, tapi Pemohon sendiri pun punya C.Hasil. Yang itu diambil dari Sirekap itu, Yang Mulia.

1495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:27]

Ya. Nanti kita yang menilai, ya.

1496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:46:29]

Ya.

1497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:30]

Boleh-boleh saja, kan kita nanti yang menilai, ya.

1498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:46:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

1499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:39]

Baik.

Untuk mengakhiri persidangan ini, perlu saya sampaikan. Perkara 297, 303, 306, 229, dan 285, ya. Ini akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi secara lengkap, sesuai dengan yang hadir harus kuorum, ya.

Terus nanti hasilnya ada dua kemungkinan. Pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam Sidang Pembuktian, kalau Mahkamah memandang masih diperlukan Sidang Pembuktian, dengan menghadirkan bukti baru yang dibutuhkan oleh Para Pihak. Juga Para Pihak bisa mengajukan saksi atau ahli, ya, kalau itu dilanjutkan. Kemudian kalau tidak dilanjutkan, maka akan langsung bisa diputus berdasarkan seluruh rangkaian ini, ya, dengan segala bukti tertulisnya, makanya kita juga tadi mengejar bukti tertulisnya.

Untuk sidang yang perkaranya dilanjutkan nanti, Saudara boleh ... masih boleh menambahkan bukti, berapa pun masih bisa. Kemudian boleh menghadirkan saksi atau ahli, jumlah saksi atau ahli 4 orang, terserah komposisinya, mau saksi semua, mau ahli semua, atau mix antara saksi dan ahli.

Untuk daftar bukti baru, identitas keterangan saksi, dan curriculum vitae-nya, serta keterangannya, harus diserahkan kepada Kepaniteraan. Paling lambat, satu hari kerja sebelum sidang pembuktian. Sidang pembuktiannya menunggu panggilan dari Kepaniteraan. Ya, pasti ... panggilan sidang pembuktiannya akan dilakukan secara patut, sehingga Saudara satu hari sebelumnya sudah bisa menyerahkan persyaratan-persyaratan ini.

Kemudian, yang kedua. Untuk penambahan alat bukti dan inzage sudah tidak diperbolehkan lagi, sekarang. Nanti kalau dilanjutkan dengan alat bukti baru, semuanya masih boleh inzage.

Terus perkara yang sudah selesai, diputus nanti, sidang pengucapan putusannya nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan dalam waktu yang cukup juga, sehingga Saudara bisa hadir pada waktu pengucapan putusan untuk perkara-perkara yang tidak dilanjutkan karena sudah dianggap cukup untuk diambil putusan, ya.

Pemohon confirm? Ya, baik. Termohon confirm? Ya. Pihak Terkait?

1500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 285/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [02:49:35]

Dimengerti, Yang Mulia.

1501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:37]

Oke. Bawaslu, confirm, ya?

Baik, terima kasih atas seluruh persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.27 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

